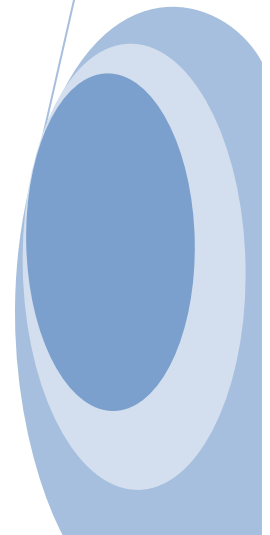




# **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

**(RENSTRA PERUBAHAN SKPD)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**



**KABUPATEN KUBU RAYA**

TAHUN 2014-2019



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya periode 2014 – 2019 dapat diselesaikan.

Renstra Perubahan **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)** Kabupaten Kubu Raya ini merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang mendukung visi dan misi Kabupaten Kubu Raya untuk Dua tahun kedepan.

Penyusunan Perencanaan Strategik (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan yaitu, *“Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakaryaannya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum”*. Upaya ini perlu dilakukan sebagai dukungan terhadap visi Kabupaten Kubu Raya yaitu, **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing”**

Perencanaan Strategik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kubu Raya

Akhir kata semoga Rencana Strategik (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, Februari 2018

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (PUPR)  
Kabupaten Kubu Raya**

**H. ENCEP MULYADI, S. Sos**  
NIP. 19610819 198603 1 012



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

<b>BAB. 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I.1
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Landasan Hukum	I.2
1.3	Maksud dan Tujuan	I.6
1.3.1	Maksud	I.6
1.3.2	Tujuan	I.6
1.4	Hubungan Renstra Dengan dokumen Perencanaan lainnya	I.7
1.5	Sistematika Penulisan	I.8
<b>BAB. 2</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1	Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	II.1
2.1.1	Tugas Pokok	II.1
2.1.2	Fungsi	II.1
2.1.3	Kewenangan	II.2
2.1.4	Struktur Organisasi OPD	II.3
2.2	Sumber Daya OPD	II.23
2.3	Kinerja Pelayanan OPD	II.30
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	II.35
<b>BAB.3</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	III.1
3.2	Kondisi Sekarang dan Proyeksi ke Depan	III.7
3.3	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.13
3.4	Telaahan Renstra Kementerian PU	III.14
3.5	Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat	III.19
3.6	Telaahan RTRW dan KLHS	III.20
3.7	Penentuan Isu – Isu Strategis	III.24
<b>BAB.4</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan	IV.1
4.2	Sasaran	IV.2
<b>BAB.5</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V.1



<b>BAB.6</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	VI.1
<b>BAB.7</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII.1
<b>BAB.8</b>	<b>PENUTUP</b>	VIII.1



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya periode 2014 – 2019 dapat diselesaikan.

Renstra Perubahan **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)** Kabupaten Kubu Raya ini merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang mendukung visi dan misi Kabupaten Kubu Raya untuk Dua tahun kedepan.

Penyusunan Perencanaan Strategik (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan yaitu, *“Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakaryaannya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum”*. Upaya ini perlu dilakukan sebagai dukungan terhadap visi Kabupaten Kubu Raya yaitu, *“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing”*

Perencanaan Strategik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kubu Raya

Akhir kata semoga Rencana Strategik (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, Februari 2018

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (PUPR)  
Kabupaten Kubu Raya**

**H. ENCEP MULYADI, S. Sos**  
NIP. 19610819 198603 1 012





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Kubu Raya terpilih yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam sisa periode masa jabatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan Penjabaran bagian dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 Khususnya penjabaran Misi ke - 4 yaitu Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan kebersihan, pertamanan, dan penerangan jalan umum diharapkan dapat mewujudkan kondisi kota yang bersih, hijau, asri, terang, dan aman yang akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Kubu Raya dan sekitarnya serta menjadikan daya tarik bagi wisatawan maupun investor.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2014-2019 merupakan bahan dari bidang kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan, penataan ruang, kebersihan, pertamanan, dan penerangan jalan umum untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019. Penyusunan Renstra OPD 2014-2019 ini merupakan sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proposional sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi





Pembangunan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program jangka menengah ini disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak besar terhadap upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 juga merupakan Dokumen Perencanaan Induk untuk dijabarkan dalam Dokumen Jangka Pendak yang lebih operasional yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya tahunan selama 5 Tahun kedepan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).





3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah



- Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5).
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2014-2019
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2).
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14).
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kubu Raya 2014 – 2019.
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16).
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 596 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya.

Perencanaan Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya disusun dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan program strategis berkelanjutan yang menjadi pedoman untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
- b. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun rencana kerja tahunan untuk menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dalam jangka menengah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya;
- b. Mempunyai dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan Kabupaten Kubu Raya;



- c. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam jangka menengah 5 (lima) tahun pembangunan.
- d. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja dinas tahunan.
- e. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya
- f. Sebagai instrument dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya sebagai SKPD teknis dalam mendukung pembangunan daerah.
- g. Memberikan pedoman penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional selama 5 tahun.

#### **1.4. Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

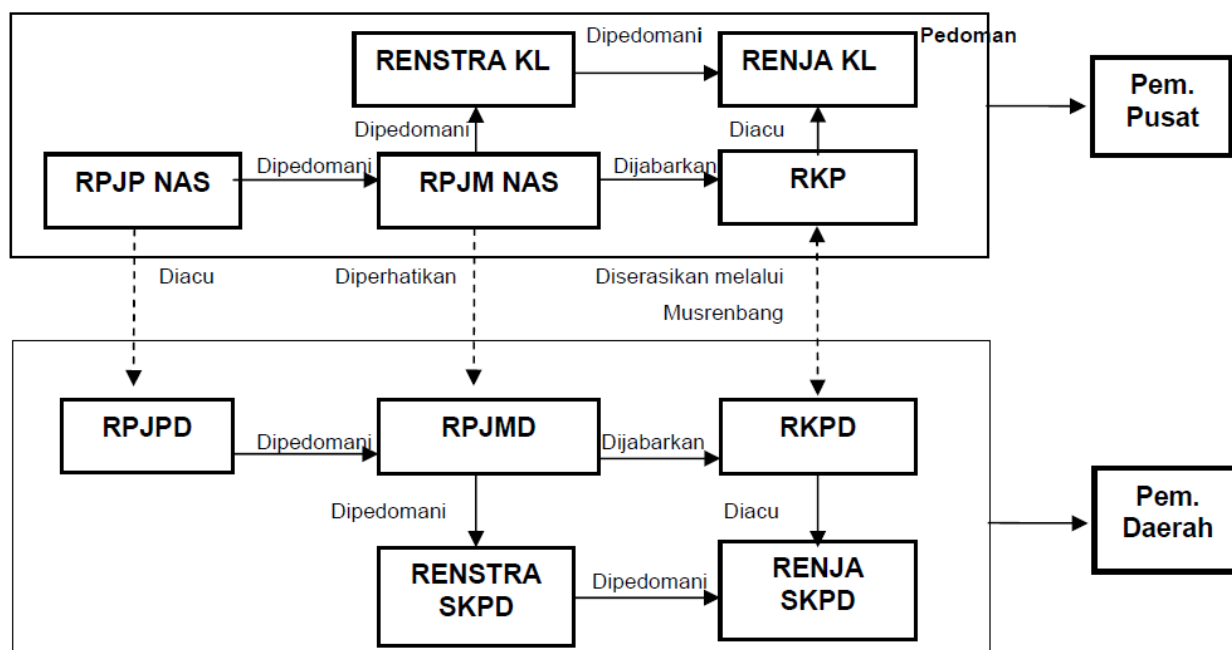
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditetapkan oleh Kepala OPD setelah mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif, yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Gambaran tentang hubungan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan system perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG (PUPR)**  
**DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH





- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Kondisi Sekarang dan Proyeksi ke Depan
- 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4. Telaahan Renstra Kementerian PU
- 3.5. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat
- 3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.2. Sasaran

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta Pendanaan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Sekretariat, Bidang Cipta karya, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

### BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Sekretariat, Bidang





Cipta karya, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Revisi Renstra secara keseluruhan.



## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya telah diatur dalam Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, pengairan, Ke-Cipakaryaan, Ke-Tata ruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2.1.1 Tugas Pokok.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya, melaksanakan kewenangan daerah dibidang umum lingkup bidang kebinamargaan, pengairan, Ke-Cipakaryaan, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

##### **2.1.2 Fungsi.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);



- b. Perumusan kebijakan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- c. Pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- f. Pembinaan Unit Penataan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) ;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Kewenangan**

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan turap/talud dan bronjong, rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan sistim informasi data base jembatan, Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana, Bidang Cipta karya meliputi Perumahan, Permukiman dan Pembangunan Gedung, Bidang Tata ruang meliputi Tata Ruang Kota, Pengendalian Tata Ruang dan Pembinaan Masyarakat, Bidang Kebersihan yakni Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan dan Penerangan Jalan Umum, Sekretariat yakni Rencana Kerja dan Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum,.



#### 2.1.4 Struktur Organisasi OPD

##### 1. KEPALA DINAS

**Tugas** : memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.

##### 2. SEKRETARIAT

**Tugas** : membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja Pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan operasional, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi 3 bagian yaitu :**

##### **Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan**

**Tugas** : mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan Laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:



- a. Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Melaksanakan kompilasi dan penyelarasan program kerja dinas;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dinas;
- d. Pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan dinas;
- f. pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- g. Penyusun dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

**Tugas :** mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan hukum;
- f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan



- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Perlengkapan dan Umum**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi ;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e. pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**Tugas** : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan, pengelolaan irigasi, air baku dan sungai, pengelolaan daerah rawa dan pantai, perencanaan teknis dan pengawasan sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;



- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
- f. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Sumber Daya Air;
- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 seksi yaitu;***

**Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





### **Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;



- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. BIDANG BINA MARGA

**Tugas** : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan teknis, pengawasan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Bina Marga;
- f. pengendalian kegiatan di Bidang Bina Marga;
- g. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Bidang Bina Marga;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga; dan



- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bidang Bina Marga membawahi 3 seksi yaitu;***

**Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

**Tugas** : mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;



- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 5. BIDANG CIPTA KARYA

**Tugas** : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman, bangunan gedung dan jasa konstruksi.

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Bangunan Gedung;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Jasa Konstruksi;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Cipta Karya;
- f. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Cipta Karya;
- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bidang Cipta Karya membawahi 3 seksi yaitu;***

### **Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.



Untuk melaksanakan tugas seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Bangunan Gedung**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Bangunan Gedung.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Bangunan Gedung;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Bangunan Gedung;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis seksi Bangunan Gedung;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di seksi Bangunan Gedung;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi Bangunan Gedung; dan
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **Seksi Jasa Konstruksi**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Jasa Konstruksi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis seksi Jasa Konstruksi;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di seksi Jasa Konstruksi;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi Jasa Konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. BIDANG PENATAAN RUANG**

**Tugas** : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengendalian ruang, penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Penataan Ruang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Perencanaan dan Pengendalian Ruang;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Penataan Ruang;





- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Penataan Ruang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bidang Penataan Ruang membawahi 2 bagian yaitu;***

**Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang;**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang sebagaimana mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

**Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;**

**Tugas** : mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;



- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

## **7. BIDANG KEBERSIHAN, PERTAMANAN dan PENERANGAN JALAN UMUM**

**Tugas** : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kebersihan, pengendalian kebersihan dan pembinaan masyarakat, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan kebersihan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di sub urusan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
- f. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;



- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum membawahi 3 bagian yaitu;**

**Seksi Kebersihan**

**Tugas :** mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kebersihan mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kebersihan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kebersihan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Kebersihan;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Kebersihan;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Kebersihan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat**

**Tugas :** mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat;



- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum**

**Tugas :** mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Tugas Pokok :** melaksanakan sebagian tugas teknis dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.

## **9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

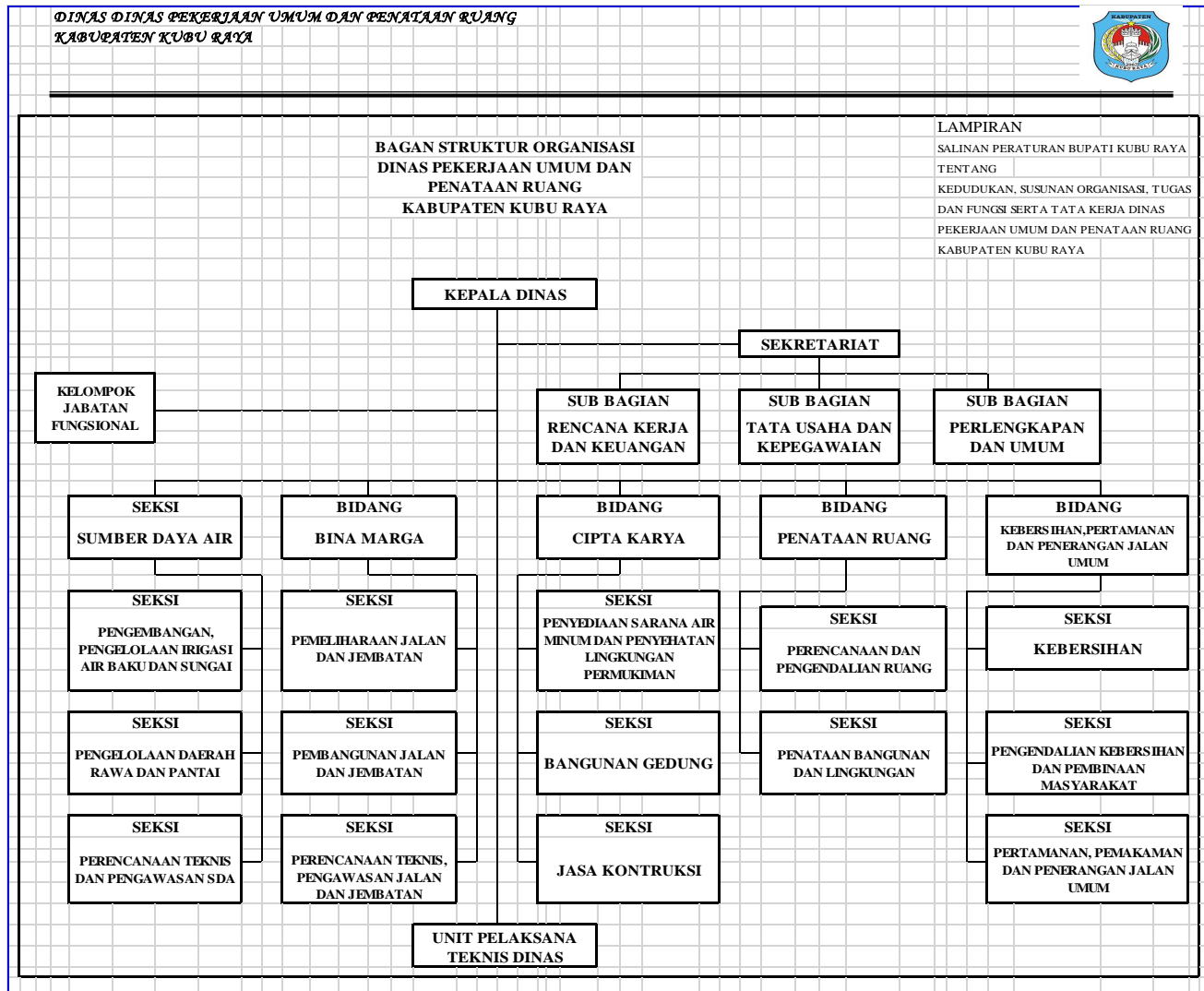


Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
  - 2.1. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan
  - 2.2. Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 2.3. Subbag Pelengkapan dan Umum
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahi ;
  - 3.1. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai
  - 3.2. Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai
  - 3.3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Sumber Daya Air
4. Kepala Bidang Bina Marga, membawahi
  - 4.1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - 4.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 4.3. Seksi Perencanaan Teknis, Pengawasan Jalan dan Jembatan
5. Kepala Bidang Cipta Karya, membawahi ;
  - 5.1. Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan  
Pemukiman
  - 5.2. Seksi Pembangunan Gedung
  - 5.3. Seksi Jasa Konstruksi
6. Kepala Bidang Penataan Ruang, membawahi ;
  - 6.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang
  - 6.2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum membawahi ;
  - 7.1. Seksi Kebersihan
  - 7.2. Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat
  - 7.3. Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:
  - 8.1. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan sebagai berikut:





**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL																	
UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA												BERLAKU UNTUK TAHUN : 2017					
TEMPAT : JL. PARTI HAJI MUKSIN II, KOMP. RUKO PELANGI, SUNGAI RAYA																	
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA																	
NO. URUT	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA			LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		USIA	CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN	KET.
			GOL./RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JLH JAM	NAMA	THN	TINGKAT LAJAZAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ir. ARI YANJARIF, MT	19680121 199703 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	01-10-2016	Fungsional Umum Subbag Perencanaan dan Umum	06-01-2017	23	7	Diklat PIM Tingkat III di Pontianak	2007	360	S 2 Universitas Indonesia	1997	S 2	49 thn 11 bln	03-01-2017	
2	MATSUM, S.Sos, MT	19610210 198403 1 010	Pembina Tk.I (IV/b)	01-04-2014	Sekretaris	06-01-2017	28	8	Diklat PIM Tingkat III di Pontianak	2015	360	M. Teknik UGM Yogyakarta	2002	S 2	56 thn 10 bln	03-01-2017	
3	RENDRA JUARSYAH, S.HUT	19700112 199703 1 004	Pembina (IV/a)	01-04-2013	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	06-01-2017	22	7	Diklat Pim IV. Mempawah	2002	285	S.2 UNTAN Pontianak	2014	S.2	47 thn 11 bln	03-01-2017	
4	KUS AGUS SARWANTO, ST.M	19680805 199803 1 012	Pembina (IV/a)	01-04-2014	Pit. Kepala Dinas PUPR / Kepala Bidang Cipla Karya	06-01-2017	19	9	Diklat Pim IV. di Pontianak	2007	285	M. Teknik UNTAN Pontianak	2009	S 2	49 thn 4 bln	03-01-2017	
5	ENCEP MULYADI, S.Sos	19610819 198603 1 012	Pembina (IV/a)	01-04-2017	Kepala Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	27	9	Diklat Pim IV. Kab. Pontianak	2008	285	S 1 UNTAN Pontianak	2001	S1	56 thn 4 bln	03-01-2017	
6	ADI MULYONO, ST	19680831 200003 1 006	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2010	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	17	9	-	-	-	S 1 UNTAN Pontianak	1994	S 1	49 thn 4 bln	03-01-2017	
7	YULIANTO, ST	19740709 200502 1 002	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2011	Kepala Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU	06-01-2017	16	10	Diklat Pim IV.	2012	360	S 1 Teknik UTP Surakarta	2000	S 1	43 thn 5 bln	03-01-2017	
8	ISKANDAR, ST	19621220 200212 1 004	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2013	Kepala Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi Air Baku dan Sungai Bidang SDA	06-01-2017	21	8	-	-	-	S1. Teknik Sipil UNTAN	1996	S 1	55 thn 0 bln	03-01-2017	
9	ERWIN RINALDY, ST.MT	19770501 2002 12 1 008	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2014	Kepala Bidang Bina Marga	06-01-2017	15	0	-	-	-	S2. Teknik Sipil	2007	S 2	40 thn 7 bln	03-01-2017	
10	ERWIN SUPRIADI, ST	19790424 200312 1 005	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2014	Kasi Pengembangan Daerah Rawan & Pantai Bidang Sumber Daya Air	06-01-2017	14	0	-	-	-	Mesin Universitas Panc Jakarta	2001	S 1	38 thn 8 bln	03-01-2017	
11	DUDUNG ZULKARNAIN, SE	19640911 198603 1 015	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2014	Kepala Subbag Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	26	9	Diklat Pim IV. di Putusibau	2005	285	STIE Boedi Oetomo Pontianak	2006	S 1	53 thn 3 bln	03-01-2017	
12	SYAFRUDDIN ASRI	19630717 198512 1 004	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2014	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat	06-01-2017	27	0	-	-	-	SMA Mujahidin Pontianak	1984	SLTA	54 thn 5 bln	03-01-2017	
13	SARIANTO	19630308 198703 1 019	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2015	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	06-01-2017	25	9	-	-	-	SMA	1983	SLTA	54 thn 9 bln	03-01-2017	
14	AIDIL BUSYRA, ST. M.Sc	19770914 200312 1 005	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2015	Fungsional Umum Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	14	0	-	-	-	S 2 Universitas Gajah M Yogyakarta	2009	S 2	40 thn 3 bln	03-01-2017	
15	ABU SUFYANDI, ST	19731212 200604 1 004	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2015	Kepala Bidang Sumber Daya Air	06-01-2017	11	8	-	-	-	S1 Teknik Mesin Muhammadiyah Pontianak	2003	S 1	44 thn 0 bln	03-01-2017	
16	ERWIN, ST	19660118 198703 1 008	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2017	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	06-01-2017	25	9	-	-	-	S1. Teknik Sipil UNTAN Pontianak	2012	S 1	51 thn 11 bln	03-01-2017	
17	ERIKA YUNIASIH, ST. MT	19780317 200604 2 018	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2017	Fungsional Umum Bidang Seksi Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	15	11	Diklat Pim IV.	-	-	S.2 Teknik Sipil UNTAN Pontianak	2015	S.2	2017 thn 12 bln	01-11-2017	
18	HERY HERMAWAN, ST. M.Eng	19760322 200502 1 005	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2017	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan SDA Bidang Sumber Daya Air	06-01-2017	12	10	-	-	-	S.2 Teknik Sipil	2011	S 2	41 thn 9 bln	03-01-2017	
19	GUNAWAN WINARDI, ST	19731129 200604 1 005	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2017	Kasi Perencanaan Teknis Pengawasan Jalan & Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	11	8	-	-	-	S.1 T. Arsitektur UII Yogyakarta	1998	S.1	44 thn 1 bln	03-01-2017	
20	DIAN ERYTA SAFITRI, ST.MT	19820519 200904 2 003	Penata Tk.I (III/d)	01-04-2017	Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU	06-01-2017	8	8	-	-	-	S.2 Teknik Sipil UGM Yogyakarta	2007	S.2	35 thn 7 bln	03-01-2017	
21	FABIANSYAH	19630804 198503 1 014	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2017	Kasubag Perencanaan dan Umum Sekretariat	06-01-2017	29	8	-	-	-	SMA	1982	SMA	54 thn 4 bln	03-01-2017	
22	DJONI, ST	19640212 199101 1 001	Penata Tk.I (III/d)	01-10-2017	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	26	10	-	-	-	S.1 Teknik Sipil UPB Pontianak	2007	S.1	53 thn 10 bln	03-01-2017	
23	Hj. ERLINA	19630420 198203 2 001	Penata (III/c)	01-04-2010	Fungsional Umum Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masy. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU	06-01-2017	30	9	Diklat Pim IV.	2010	-	SMA	1981	SLTA	54 thn 8 bln	03-01-2017	
24	ISWAN, S.ST	19710403 199803 1 010	Penata (III/c)	01-04-2015	Fungsional Umum Seksi Irigasi, Air Baku dan Sungai Bidang Sumber Daya Air	06-01-2017	14	9	-	-	-	D.IV Teknik Perencanaan Sungai & Pantai	2006	D.IV	46 thn 8 bln	03-01-2017	
25	KARIEL SINAGA, ST	19730303 200801 1 017	Penata (III/c)	01-04-2016	Fungsional Umum Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	14	11	-	-	-	S.1 Teknik Sipil UPB Pontianak	2001	S.1	44 thn 9 bln	03-01-2017	
26	SUDARSONO, S.SOS	19691010 200003 1 007	Penata (III/c)	01-04-2016	Kepala Seksi Kebersihan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU	06-01-2017	12	9	-	-	-	S.1 SOSPOL UNTAN PONTIANAK	2008	S.1	48 thn 2 bln	03-01-2017	
27	SUPRATMANSYAH, ST	19730806 200802 1 001	Penata (III/c)	01-04-2016	Kepala Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipla Karya	06-01-2017	9	10	-	-	-	S.1 Teknik Sipil UPB Pontianak	2001	S.1	44 thn 4 bln	03-01-2017	
28	M. ADI SUFRIADI, ST	19700904 200502 1 003	Penata (III/c)	01-04-2016	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	9	8	-	-	-	T.Sipil UNTAN Pontianak	1996	S.1	47 thn 3 bln	03-01-2017	
29	WINDY EKA PUSPITA, ST	19780627 200903 2 005	Penata (III/c)	01-04-2016	Kepala Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipla Karya	06-01-2017	8	9	-	-	-	S1 T.Sipil UNTAN Pontianak	2004	S.1	39 thn 6 bln	03-01-2017	
30	ACHMAD MARWAN, ST. ME	19800521 200803 1 001	Penata (III/c)	01-04-2016	Fungsional Umum Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan SDA Bidang SDA	01-09-2017	9	9	-	-	-	S2 Ekonomi UI Jakarta	2004	S.2	37 thn 7 bln	01-09-2017	





**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

31	M. HEFNI, S.ST	19660606 199703 1 006	Penata (IIIc)	01-10-2016	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	15	9	-	-	-	D.IV Teknik Sipil dan Perencanaan	2008	D.IV	51 6 bln	03-01-2017
32	AMRI ACHMAD, ST	19750302 200903 1 007	Penata (IIIc)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	8	9	-	-	-	S.1 Teknik Sipil UNTAN Pontianak	1999	S.1	42 9 bln	03-01-2017
33	AGUS SUPRIYANTO, S.Pd	19750823 200903 1 003	Penata (IIIc)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya	06-01-2017	8	9	-	-	-	S.1 T.Bangunan IKIP N Pontianak	1998	S.1	42 4 bln	03-01-2017
34	DESI INDRANI, ST	19751209 200903 2 001	Penata (IIIc)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	8	9	-	-	-	S.1 T.Arsitektur Uli Yogyakarta	2001	S.1	42 0 bln	03-01-2017
35	IRMA RISTINA, SE	19800419 200212 2 003	Penata Muda Tk.I (IIIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Subbag Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	13	0	-	-	-	S.1 Akuntansi Pontianak	2008	S.1	37 8 bln	03-01-2017
36	JONI, ST	19811108 201001 1 010	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	7	11	-	-	-	S.1 T.Sipil UNTAN Pontianak	1995	S.1	36 1 bln	03-01-2017
37	APRIANSYAH, ST	19750417 201001 1 007	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Perumahan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya	06-01-2017	7	11	-	-	-	S.1 T.Sipil UNTAN Pontianak	1999	S.1	42 8 bln	03-01-2017
38	GUSTI MELANI SISILIA, ST	19770201 201001 2 003	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan SDA Bidang SDA	06-01-2017	7	11	-	-	-	S.1 Teknik Sipil Pengairan	2002	S.1	40 10 bln	03-01-2017
39	IMELDA FEBRIANA, ST	19830213 201001 2 012	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Perumahan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya	06-01-2017	7	11	-	-	-	S.1 T.Sipil UNTAN Pontianak	2006	S.1	34 10 bln	03-01-2017
40	BAYU PRIMA HARYANTO, ST	19840506 201001 1 004	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Bidang Penataan Ruang	06-01-2017	7	11	-	-	-	Perencanaan Wilayah dan (UNISBA)	2008	S.1	33 7 bln	03-01-2017
41	WIRDA DHANIGA, SE	19850608 201001 2 010	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2014	Fungsional Umum Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	06-01-2017	7	11	-	-	-	S.1 Ekonomi Manajemen Pontianak	2007	S.1	32 6 bln	03-01-2017
42	SOMADI, A.Md	19760212 199803 1 002	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-10-2015	Fungsional Umum Seksi Perencanaan Teknis Pengawasan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	14	9	-	-	-	D.3 Teknik Sipil dan Per Pontianak	2003	D.3	41 10 bln	03-01-2017
43	ROHADI, ST	19700918 199703 1 006	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2016	Fungsional Umum di Seksi Pengembangan di Daerah Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air	06-01-2017	18	9	-	-	-	S.1 T.Sipil UNTAN Pontianak	2006	S.1	47 3 bln	03-01-2017
44	RADITYA HARDIANTO, SE	19840308 200803 1 001	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-04-2016	Fungsional Umum Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Bidang Kebersihan	06-01-2017	7	9	-	-	-	S.1 Ekonomi STIE Pontianak	2010	S.1	33 9 bln	03-01-2017
45	SUBKHAN, MS	19681204 199703 1 003	Penata Muda Tk.I (IIIb)	01-10-2016	Fungsional Umum Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai Bidang SDA	06-01-2017	15	9	-	-	-	STM Mesin Listrik	1989	STM	49 0 bln	03-01-2017
46	SOEPARDIK	19620507 199703 1 001	Penata Muda IIIb	01-04-2017	Kepala Sub Bagian TU UPT Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan	06-01-2017	15	9	-	-	-	SMA	1984	SMA	55 7 bln	03-01-2017
47	DADANG SURYAWUJAYA	19670714 199012 1 002	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Kebersihan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PUJ	06-01-2017	22	0	-	-	-	STM Negen 1	1986	SMK	50 5 bln	03-01-2017
48	IRNA NINGSIH, A.Md	19731219 200604 2 007	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Subbag Perlengkapan dan Umum Sekretariat	06-01-2017	17	8	-	-	-	D3 Komputer Informatika	1997	D.3	44 0 bln	03-01-2017
49	SUCIPTO INDRA	19660904 199803 1 008	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai Bidang SDA	06-01-2017	14	9	-	-	-	SMA A.3 IPS	1988	SMA	51 3 bln	03-01-2017
50	SAMUJI	19680716 199803 1 005	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi Air Baku dan Sungai Bidang SDA	06-01-2017	14	9	-	-	-	SMA A.3 IPS	1989	SMA	49 5 bln	03-01-2017
51	SUKARJI	19690714 199803 1 007	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	14	9	-	-	-	SMA	1990	SMA	48 5 bln	03-01-2017
52	HENDRIANSYAH, SP	19800131 200701 1 004	Penata Muda (IIIa)	01-04-2014	Fungsional Umum Subbag Perlengkapan dan Umum Sekretariat	06-01-2017	13	5	-	-	-	S.1 Agroteknologi	2012	S.1	37 11 bln	03-01-2017
53	MUH. MAULUDIN, A.Md	19800123 200604 1 006	Penata Muda (IIIa)	01-10-2014	Fungsional Umum Subbag Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	9	8	-	-	-	D3 Administrasi Perkantoran	2002	D.3	37 11 bln	03-01-2017
54	SAAD, ST	19790804 201407 1 001	Penata Muda (IIIa)	01-07-2016	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	12	11	-	-	-	S1 T.Sipil UNIBRAW	2004	S.1	38 4 bln	03-01-2017
55	FRANSISCUS SUDARTO, ST	19850424 201501 1 001	Penata Muda (IIIa)	01-01-2017	Fungsional Umum Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	3	0	-	-	-	S1 T.Sipil UNIDIP	2010	S.1	32 8 bln	03-01-2017
56	ROVI PERANTISA, ST	19860902 201501 1 001	Penata Muda (IIIa)	01-01-2017	Fungsional Umum Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya	06-01-2017	3	0	-	-	-	S.1 Teknik UNTAN Pontianak	2009	S.1	31 3 bln	03-01-2017
57	GUSTI AYU EVY RESTYANTI, S	19870103 201501 2 001	Penata Muda (IIIa)	01-01-2017	Fungsional Umum Subbag Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	3	0	-	-	-	S.1 UNTAN Pontianak	2009	S.1	30 11 bln	03-01-2017
58	ROBIE ASTA, ST	19810131 201501 1 001	Penata Muda (IIIa)	01-01-2017	Fungsional Umum Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang badang Penataan Ruang	06-01-2017	3	0	-	-	-	S.1 Teknik UNTAN Pontianak	2014	S.1	26 11 bln	03-01-2017
59	FERYANSYAH, A.Md	19810222 200903 1 003	Penata Muda (IIIa)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya	06-01-2017	6	9	-	-	-	D3 Teknik Sipil & Peren Polnep Pontianak	2003	D.3	36 10 bln	03-01-2017
60	DICKY DARMAWANSYAH, A.M	19811231 200903 1 003	Penata Muda (IIIa)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya	06-01-2017	6	9	-	-	-	D3 Teknik Sipil Polnep Pontianak	2003	D.3	36 0 bln	03-01-2017



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

61	HESTI FURWASYARI, S.ST	19851108 201001 2 020	Penata Muda (IIIa)	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	5	11	-	-	-	D.IV T. Sipil polnep Pontianak	2016	D.IV	32 thn 1 bln	03-01-2017	
62	ERNAWATI, SE	19861014 201001 2 010	Penata Muda (IIIa)	01-04-2017	Fungsional Umum Subbag Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat	06-01-2017	5	11	-	-	-	S.1 Ekonomi Akuntansi UPB Pontianak	2016	S.1	31 thn 2 bln	03-01-2017	
63	ITA MAHMUDAH, SE	19690906 200312 2 007	Penata Muda (IIIa)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Kebersihan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PUJ	06-01-2017	9	0	-	-	-	S.1 Ekonomi Akuntansi UPB Pontianak	2016	S.1	48 thn 3 bln	03-01-2017	
64	ABANG YANUAR SAPUTRA, S	19770129 201710 1 001	Penata Muda (IIIa)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Penyediaan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya	01-11-2017	0	2	-	-	-	S.1 Teknik Sipil	2001	S.1	40 thn 11 bln	01-11-2017	CPNS
65	M. NANIK LESTARI, S.T	19770907 201710 2 001	Penata Muda (IIIa)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Ruang	01-11-2017	0	2	-	-	-	S.1 Teknik Sipil	2001	S.1	40 thn 3 bln	01-11-2017	CPNS
66	TRIANI, S.T	19830805 201710 2 001	Penata Muda (IIIa)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Bidang Penataan Ruang	01-11-2017	0	2	-	-	-	S.1 Teknik Sipil	2007	S.1	34 thn 4 bln	01-11-2017	CPNS
67	VOLANSYAH, A.Md	19740628 200903 1 004	Pengatur Tk.I (IIId)	01-04-2013	Fungsional Umum Subbag Tata Usaha UPT Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan	06-01-2017	11	9	-	-	-	D.3 Akuntansi STE Pontianak	2001	D.3	43 thn 6 bln	03-01-2017	
68	IRWAN KUSUMA, A.Md	19830319 201001 1 005	Pengatur Tk.I (IIId)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 Teknik Arsitektur	2004	D.3	34 thn 9 bln	03-01-2017	
69	ZULFKAR I. AMSYAH, A. Md	19840909 201001 1 010	Pengatur Tk. I (IIId)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 POLNEP Pontianak	2005	D.3	32 thn 3 bln	03-01-2017	
70	MOCHAMAD SUBECHI, A.Md	19781201 201001 1 010	Pengatur Tk.I (IIId)	01-04-2014	Fungsional Umum Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 T.Sipil Polnep Pontianak	2000	D.3	39 thn 0 bln	03-01-2017	
71	FITRIANTI, A.Md	19810726 201001 2 005	Pengatur Tk.I (IIId)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan SDA Bidang SDA	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 Manajemen Informatika	2003	D.3	36 thn 5 bln	03-01-2017	
72	HILDA MURDIKAWATI, A. Md	19860902 201001 2 014	Pengatur Tk.I (IIId)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 Komputer	2008	D.3	31 thn 3 bln	03-01-2017	
73	ATIKA CITRA PARAMITA, A.Md	1986 0204 201001 2 019	Pengatur Tk.I (IIId)	01-10-2014	Fungsional Umum Subbag Perlengkapan dan Umum Sekretariat	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.3 T. Sipil Polnep Pontianak	2007	D.3	31 thn 12 bln	03-01-2017	
74	MUSLIMIN	19610808 198303 1 015	Pengatur (IIc)	01-04-2003	Fungsional Umum Seksi Kebersihan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PUJ	06-01-2017	31	9	-	-	-	SLTP	1977	SLTP	56 thn 4 bln	03-01-2017	
75	DEDY	19700730 200604 1 003	Pengatur Tk.I (IIc)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya	06-01-2017	27	7	-	-	-	SLTA	1989	SLTA	47 thn 5 bln	03-01-2017	
76	GUSPIANTO	19660317 199903 1 003	Pengatur Tk.I (IIc)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pengelolaan daerah Rawa dan Pantai Bidang SDA	06-01-2017	15	9	-	-	-	SMA	2003	SLTA	51 thn 9 bln	03-01-2017	
77	ABDUL SYUKUR, A.Ma	19751023 201001 1 011	Pengatur (IIc)	01-04-2014	Fungsional Umum Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Bidang Kebersihan	06-01-2017	10	11	-	-	-	D.2 Teknik Elektro	1997	D.2	42 thn 2 bln	03-01-2017	
78	HADI SUSIO	19710506 200701 1 016	Pengatur (IIc)	01-04-2015	Fungsional Umum Subbag Tata Usaha UPT Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan	06-01-2017	23	8	-	-	-	SMA	1990	SLTA	46 thn 7 bln	03-01-2017	
79	A.FAIRUDI	19651121 200701 1 013	Pengatur (IIc)	01-04-2015	Fungsional Umum Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Bidang Kebersihan	06-01-2017	16	11	-	-	-	SMA	1984	SMA	52 thn 1 bln	03-01-2017	
80	ABDUL HALEK	19600630 199703 1 001	Pengatur (IIc)	01-04-2016	Fungsional Umum Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi Air Baku dan Sungai Bidang SDA	06-01-2017	14	9	-	-	-	Paket B	2004	SMA	57 thn 6 bln	03-01-2017	
81	MUHAMMAD IRWAN, A.Md	19770115 201710 1 001	Pengatur (IIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi Air Baku dan Sungai Bidang SDA	01-11-2017	3	2	-	-	-	D.3 Teknik Sipil	1998	D.3	40 thn 11 bln	01-11-2017	CPNS
82	ZULKHAIDIR, A.Md	19780525 201710 1 001	Pengatur (IIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Pengelolaan Daerah Rawa dan Pantai Bidang SDA	01-11-2017	3	2	-	-	-	D.3 Teknik Sipil	2000	D.3	39 thn 7 bln	01-11-2017	CPNS
83	MAHFURYADI, A.Md	19790908 201710 1 001	Pengatur (IIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	01-11-2017	3	2	-	-	-	D.3 Teknik Sipil	2002	D.3	38 thn 3 bln	01-11-2017	CPNS
84	ISRA WAHYUNI, A.Md	19800605 201710 2 001	Pengatur (IIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	01-11-2017	3	2	-	-	-	D.3 Teknik Sipil	2000	D.3	37 thn 6 bln	01-11-2017	CPNS
85	DEWA SRI BINTAWATI, A. Md	19820801 201710 2 001	Pengatur (IIc)	01-10-2017	Fungsional Umum Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat	01-11-2017	3	2	-	-	-	D.3 Manajemen Perkantoran ASMI Pontianak	2007	D.3	35 thn 4 bln	01-11-2017	CPNS
86	TUJA	19670912 199703 1 005	Pengatur Muda Tk. (IIb )	01-04-2017	Fungsional Umum Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi Air Baku dan Sungai Bidang SDA	06-01-2017	14	9	-	-	-	Paket B	2006	SLTP	50 thn 3 bln	03-01-2017	



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam menjalankan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kubu Raya, didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 547 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil berjumlah 76 orang dan Tenaga Kerja Kontrak berjumlah 471 orang. Latar Belakang pendidikan, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut (DUK):

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.2.1, Tabel 2.2.2 Tabel 2.2.3. sebagai berikut

**Tabel 2.2.1**  
**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KAB.KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**TAHUN 2017**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S-2	10 orang	11,63
2.	S-1	40 orang	46,51
3.	D.IV	3 orang	3,49
3.	D.3	18 orang	20,93
4.	SLTA	13 orang	15,12
5.	SLTP	2 orang	2,33
<b>Jumlah</b>		<b>86 orang</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Tingkat Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kubu Raya, 2017

Berdasarkan Tabel 2.2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya adalah yang berpendidikan



S2 (Pasca Sarjana) yaitu sebesar 11,63 %. dan Sarjana (S1) yaitu sebesar 46,51 % Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan cukup baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**  
**SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KAB.KUBU**  
**RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2017**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina IV/c	1 orang	1,16
2.	Pembina Tk. I IV/b	1 orang	1,16
3.	Pembina Muda IV/a	3 orang	3,49
4.	Penata Tk. III/d	17 orang	19,77
5.	Penata III/c	13 orang	15,12
6.	Penata Muda Tk. I III/b	11 orang	12,79
7.	Penata Muda III/a	20 orang	23,26
8.	Pengatur Tk. I II/d	7 orang	8,14
9.	Pengatur II/c	12 orang	13,95
10.	Pengatur Muda Tk. I II/b	1 orang	1,16
<b>Jumlah</b>		<b>86 orang</b>	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya T.A 2017



Berdasarkan Tabel 2.2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan sebagian besar berpangkat Penata Muda atau sebesar 23,26 %

Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.3**  
**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**  
**RUANG (PUPR) KAB.KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN ESELON TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	II.b	orang	0
2.	III.a	1 orang	1,16
3.	III.b	5 orang	5,81
4.	IV.a	24 orang	27,91
5.	IV.b	4 orang	4,65
6.	Staf	52 orang	60,42
<b>Jumlah</b>		<b>86 orang</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Eselon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya T.A.2017

Berdasarkan Tabel 2.2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai dengan Eselon IV.b  
*Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014 -2019* Bab II- 25



masih terdapat 1 (satu) eselon yang belum terisi yaitu eselon II/b. Dukungan tenaga staf (fungsional Umum) sebanyak 52 (lima puluh dua) orang atau sebesar 60,42 % dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi.

Sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga teknis di bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.2.4**  
**JUMLAH KONDISI SARANA DAN PRASARANA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Alat-alat Berat</b>		
<b>1</b>	Eskavator	2 unit
<b>2</b>	Stoom Wals	3 unit
<b>3</b>	Back Hoe	1 unit
<b>4</b>	Mesin Penyemprot Aspal	1 unit
<b>5</b>	Mesin Mollen	0 unit
<b>6</b>	Mobil Pik Up	2 unit
<b>7</b>	Sepeda Motor	26 unit
<b>8</b>	Dumd truck	6 unit
<b>9</b>	AC	11 unit
<b>10</b>	Meja Rapat	9 buah
<b>11</b>	Meja kerja pejabat eselon 2	2 buah
<b>12</b>	Meja kerja pejabat eselon 3	2 buah
<b>13</b>	Meja meja kerja Non Struktural	38 buah
<b>14</b>	lemari Kayu	5 buah
<b>15</b>	Rak Kayu	5 buah
<b>16</b>	Lemari besi	7 buah
<b>17</b>	Brankas	1 unit



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>18</b>	Rak besi	6 unit
<b>19</b>	Generating	1 buah
<b>20</b>	Alat ukur	4 buah
<b>21</b>	GPS	5 Buah
<b>22</b>	Alat ukur lainnya	10 buah
<b>23</b>	Kursi kerja putar	9 buah
<b>24</b>	Handy cam	2 buah
<b>25</b>	Camera	2 buah
<b>26</b>	Komputer /PC all in One	7 buah
<b>27</b>	Absensi Digital	1 buah
<b>28</b>	UPS/ Stabilezer	11 buah
<b>29</b>	Laptop /note book acer	3 unit
<b>30</b>	Laptop /note book asus	11 unit
<b>31</b>	Laptop lenovo	1 unit
<b>32</b>	Printer Scanner copy	8 unit
<b>33</b>	Printer ukuran A3	6 unit
<b>34</b>	Printer Scanner Uk. A4	1 buah
<b>35</b>	Printer Laser Jet	1buah
<b>36</b>	Penghancur kertas	2 buah
<b>37</b>	Printer Scanner Uk. A4	8 buah

**Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan UPJJP**

**Bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Kebersihan,  
Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meja Kepala Dinas	1 buah	Baik
2	Meja kerja staf	95 buah	97 Baik, 1 Rusak Berat, 1 Rusak Sedang
3	Meja rapat	3 buah	Baik
4	Meja biro eselon II dan	6 buah	Baik
5	Kursi putar	29 buah	Baik
6	Kursi kerja staf	89 buah	Baik
7	Kursi Plastik	28 buah	Baik





**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

8	Kursi Tunggu Type 3 Susun	3 buah	Baik
9	Brankas	3 buah	Baik
10	Lemari kayu	5 buah	Baik
11	Lemari arsip	15 buah	Baik
12	Filling cabinet	20 buah	Baik
13	Filling arsip	2 buah	Baik
14	Meja computer	2 buah	Baik
15	Komputer PC	13 unit	Baik
16	Monitor	2 unit	Baik
17	Printer	30 unit	Baik
18	Printer Besar Uk. A3	5 buah	Baik
19	Papan pengumuman	2 buah	Baik
20	Kamera digital	2 buah	Baik
21	Multimedia proyektor	1 buah	Baik
22	Mesin facsimile	1 buah	Baik
23	Laptop	12 unit	Baik
24	GPS	14 unit	Baik
25	Mesin Absensi	1 unit	Baik
26	Air Conditioning	12 unit	Baik
27	Generator Set	1 Unit	Baik
28	Kipas Angin	28 buah	Baik
29	Dispenser	1 buah	Baik
30	Sound system	1 buah	Baik
31	Camera video	2 buah	Baik
32	Meteran manual	8 buah	Baik
33	Rak kayu	2 buah	Baik
34	UPS	6 buah	Baik
35	Rak besi	1 buah	Baik
36	Digital Multimeter	11 buah	Baik
37	Fingerprint Scanner	1 buah	Baik
38	CCTV	1 paket	Baik
39	Scanner	1 buah	Baik
40	Stabilizer	3 buah	Baik
41	Papan Pengumuman	1 buah	Baik
42	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik
43	Kotak Pengaduan	1 buah	Baik
44	Kotak Kepuasan	1 buah	Baik
45	Speaker	1 buah	Baik



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

46	Amplifier	1 buah	Baik
47	Mic	1 buah	Baik
48	Rak Arsip Kayu Besar	2 buah	Baik
49	Meteran Digital Laser	1 buah	Baik

Untuk menunjang operasional kegiatan, **Bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum** memiliki alat dan kendaraan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Kendaraan dinas Kepala Dinas (Toyota Rush)	1 unit	Baik
2	Dump truck	11 unit	Baik
3	Arm roll truck 6 m3	3 unit	Baik
4	Sepeda motor	13 unit	Baik
5	Excavator	2 unit	Baik
6	Kontainer	14 unit	Baik
7	Mobil pick-up	1 unit	Baik
8	Molen	2 unit	Baik
9	Kendaraan roda tiga	7 unit	Baik
10	Chain saw	4 unit	Baik
11	Mesin potong rumput	27 unit	Baik
12	Kabin dan bak dump truck	4 unit	Baik
13	Bak Arm roll	6 unit	Baik
14	Buldozer	1 unit	Baik
15	Mesin Air Type 126 GX	1 unit	Baik
16	Alat Semprot Desinfektan	3 buah	Baik
17	Truck Tangki Air	1 unit	Baik
18	Truck Arm Roll	5 unit	Baik
19	Pickup S. Cabin 2.0	4 unit	Baik



	M/T		
20	Pickup D Cabin 4x4	1 unit	Baik
21	Kendaraan Roda Tiga	6 unit	Baik
22	Pengadaan WC Portable (Knock Down)	10 buah	Baik
23	Pengadaan Gerobak Gandeng Pengangkut WC Portable	1 buah	Baik
24	Truck Lift	1 unit	Baik

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dan pada Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan Anggaran Realisasi yang disampaikan pada tabel tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya (tertera dalam tabel lampiran)



*DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA*



DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0%	0%
2	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kinerja dan profesionalisme aparatur SKPD, penyelenggaraan sarana dan prasaranaa paratur, penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0%	0%
3	Nilai hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat							B	B										
4	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik/ mantap (%)				32.00	34.00	59.00	64.00	69.00	51.78	45.69	54.09			161.82%	134.38%	91.68%	0%	0%
5	Persentase kondisi jalan lingkungan dalam keadaan baik/ mantap (%)				32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	11.03	53.63	56.59			34.47%	157.74%	157.19%	0%	0%
6	Panjang jalan kabupaten terbangun (km)				46.00	51.00	56.00			5.00	34.00	82.51			10.87%	66.67%	147.34%		
7	Panjang jalan lingkungan terbangun (km)				390.00	465.00	365.00			115.73	925.12	50.24			29.67%	198.95%	13.76%		
8	Persentase kondisi jembatan kabupaten dalam keadaan baik/ mantap (%)							74.40	80.00										



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

9	Persentase kondisi jembatan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%)						35.00	37.50										
10	Panjang jembatan terbangun pada jalan kabupaten (meter)				80.00	100.00	125.00			50.00	10.00	107.50			62.50%	10.00%	86.00%	
11	Panjang jembatan terbangun pada jalan lingkungan (meter)				612.00	702.00	312.00			1,298.80	1,063.70	228.00			212.22%	151.52%	73.08%	
12	Jumlah jembatan yang diperbaiki dan dibangun (Unit)				12.00	13.00	14.00			13.00	13.00	5.00			108.33%	100.00%	35.71%	
13	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan							75.00	77.50									
14	Persentase desa yang di aliri air bersih							32.00	47.00									
15	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi (%)							80.00	85.00									
16	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi yang mengalir luas sawah (%)							30.00	35.00									
17	Persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik dan berfungsi							60.00	65.00									
18	Rasio Pengairan/Sumber Daya Air (%)				50.00	60.00	70.00			31.50	20.00	29.42			63.00%	33.33%	42.03%	
19	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%)				40.00	45.00	50.00			31.50	20.00	30.00			78.75%	44.44%	60.00%	
20	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%)				60.00	65.00	70.00	75.00	78.00	40.00	50.00	26.15			66.67%	76.92%	37.36%	0%



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

21	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)				100.00	100.00	100.00			-	-	60.00			0.00%	0.00%	60.00%		
22	Rasio RTH (Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan)				6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	0.0018138	0.0018138	0.0019023			0.03%	0.03%	0.02%	0%	0%
23	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang) (%)				72.00	77.00	82.00			50.40	61.60	65.00			70.00%	80.00%	79.27%		
24	Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)							57.50	60.00										
25	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%)				50.00	52.50	55.00			45.00	52.00	39.71			90.00%	99.05%	72.21%		
26	Persentase sampah yang di tangani (%)							70.00	73.00										
27	Persentase cakupan pelayanan persampahan				22.00	29.00	36.00			13.94	18.10	40.00			63.36%	62.41%	111.11%		
28	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%)				16.00	17.00	18.00			20.00	12.00	30.00			125.00%	70.59%	166.67%		
29	Persentase pengangkutan sampah				58.00	61.00	64.00			13.94	48.40	75.00			24.03%	79.34%	117.19%		
30	Persentase pengoperasian TPA				20.00	32.50	45.00			15.00	20.00	80.00			75.00%	61.54%	177.78%		





**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

31	Jumlah wilayah kecamatan yang dialiri air bersih				5.00	7.00	9.00			4.00	2.00	2.00			80.00%	28.57%	22.22%		
32	Persentase Cakupan pelayanan air bersih perdesaan				5.70	5.97	6.00			1.72	7.07	7.54			30.18%	118.43%	125.59%		
33	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman				70.00	72.93	75.88			22.22	40.57	40.57			31.74%	55.63%	53.47%		
34	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai				48.00	51.00	51.03			45.10	45.10	45.10			93.96%	88.43%	88.38%		
35	Persentase Pelayanan listrik PJU yang berfungsi (%)							98.32	99.73										
36	Persentase cakupan pelayanan listrik PJU				93.88	95.39	96.87			35.00	55.15	89.97			37.28%	57.82%	92.88%		



## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya Untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, serta berpedoman kepada permendagri 54 tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

### 2.4.1. Faktor Pendorong

Demi tercapainya visi dan misi SKPD maka dalam menghadapi tantangan tersebut, potensi yang ada dapat menjadi faktor pendorong dan pendukung yang bisa memberikan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), antara lain :

1. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya.
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2009 tentang *Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja*
3. Visi dan Misi SKPD yang jelas dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



4. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor
6. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya
7. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
8. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
9. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
10. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan
11. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme
12. *Goodwill* Kepala Daerah (Bupati) terhadap program dan kegiatan SKPD
13. Ketersediaan dana melalui APBD Kabupaten
14. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan dan memperlancar program dan kegiatan SKPD
15. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

#### **2.4.2. Faktor Penghambat**

Akan tetapi hal ini juga tidak luput dari faktor penghambat yang dapat menjadi kelemahan (*weakness*) dan sebagai



ancaman (*threats*) dalam pencapaian visi dan misi SKPD, diantaranya

1. Belum adanya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya
2. Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya
3. Prasarana gedung kantor yang belum dimiliki sendiri (masih menyewa) dan dalam bentuk ruko belum representatif untuk menunjang kinerja Dinas
4. Alokasi dana yang penganggarnya masih terbatas dalam mendukung program dan kegiatan SKPD
5. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
6. Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan dan jembatan serta sarana irigasi melebihi kegiatan yang telah ditetapkan
7. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi batas yang diijinkan, sehingga mengakibatkan tingkat kerusakan jaringan jalan menjadi lebih tinggi sehingga diperlukan dana yang relatif lebih besar untuk memperbaikinya dan memeliharanya
8. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), air bersih, drainase, persampahan
9. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya
10. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah
11. Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya



Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya, adalah terdiri dari:

1. terselesaikannya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan
3. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
4. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik
5. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya

Mencermati faktor-faktor diatas, maka kedepannya perlu diambil beberapa langkah antisipatif yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, antara lain :

1. Tersedianya prasarana gedung kantor dan fasilitas penunjangnya yang representatif dan dimiliki sendiri sehingga dapat menjadi penunjang untuk semakin meningkatnya kinerja SKPD;
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan SKPD yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya agar sebanding dengan beban kerja yang diterima sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal;
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia di lingkungan SKPD agar lebih profesional melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten, baik itu



melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir usulan dan tuntutan masyarakat secara proporsional;
6. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun agar tidak mudah mengalami kerusakan.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Bina Marga dan Pengairan Untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2015-2019, serta berpedoman kepada permendagri 54 tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan peluang serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat di lihat pada table 2.3.2.



DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Uraian (1)	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (17)	Realisasi (18)
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2015 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)		
<b>BELANJA</b>																	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,050,000,000	5,263,348,531.50	5,821,937,605	5,880,526,678.50	5,939,115,752.00	3,760,092,300	3,603,848,390	5,821,937,605	5,880,526,679	5,939,115,752	74.46%	68.47%	100.00%	100.00%	100.00%	4.21	8.98
Belanja Pegawai	2,925,579,958	3,259,139,136	8,252,409,891	8,252,409,891	8,252,409,891	2,715,924,553	2,191,311,694	8,252,409,891	8,252,409,891	8,252,409,891	92.83%	67.24%	100.00%	100.00%	100.00%	41.15	13.53
<b>BELANJA LANGSUNG</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,761,000,000	9,809,782,028	142,800,000	156,200,000.00	171,820,000.00	9,754,454,614	9,421,993,616	43,428,669	156,200,000	171,820,000	99.93%	96.05%	30.41%	100.00%	100.00%	(19.67)	(5,379.36)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			122,204,813	121,501,300.00	133,651,430.00			115,681,700	121,501,300	133,651,430			94.66%	100.00%	100.00%	4.71	6.94
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13,200,000	15,840,000	50,000,000	50,000,000.00	55,000,000.00	12,382,500	11,569,500	47,262,000	50,000,000	55,000,000	93.81%	73.04%	94.52%	100.00%	100.00%	61.41	20.88
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84,800,000	19,098,000	8,364,800	15,182,700.00	16,700,970.00	78,296,700	7,953,000	8,364,800	15,182,700	16,700,970	92.33%	41.64%	100.00%	100.00%	100.00%	(10.54)	(7.73)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,312,300	45,554,900	117,361,000	150,002,600.00	165,002,860.00	40,086,300	29,995,200	117,345,500	150,002,600	165,002,860	99.44%	65.84%	99.99%	100.00%	100.00%	52.11	20.03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,004,600	36,127,675	34,768,600	30,000,000.00	33,000,000.00	20,504,600	10,815,675	34,545,500	30,000,000	33,000,000	82.00%	29.94%	99.36%	100.00%	100.00%	9.25	3.84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,806,400	6,967,650	11,393,600	17,053,600.00	18,758,960.00	5,806,400	6,967,650	11,393,600	17,053,600	18,758,960	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	35.80	25.28
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,528,000	8,968,000	8,760,000	8,760,000.00	9,636,000.00	5,928,000	4,446,000	8,440,000	8,760,000	9,636,000	78.75%	49.58%	96.35%	100.00%	100.00%	6.70	8.77
Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000	15,885,000	39,000,000	39,000,000.00	42,900,000.00	9,465,000	9,475,000	39,000,000	39,000,000	42,900,000	63.10%	59.65%	100.00%	100.00%	100.00%	40.35	21.23
Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	111,270,000	121,720,000	258,000,000	252,320,000.00	277,552,000.00	41,649,350	26,299,300	212,463,042	252,320,000	277,552,000	37.43%	21.61%	82.35%	100.00%	100.00%	32.29	18.91
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	88,260,050	71,860,050	150,000,000	232,505,000.00	255,755,500.00	30,870,000	14,170,000	109,317,000	232,505,000	255,755,500	34.98%	19.72%	72.88%	100.00%	100.00%	38.79	23.75
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	83,441,800	10,000,000	7,000,000	9,999,000.00	10,998,900.00	53,578,400	5,498,350	6,997,900	9,999,000	10,998,900	64.21%	54.98%	99.97%	100.00%	100.00%	(16.29)	(7.30)
Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran		230,760,000	817,200,000	1,003,800,000.00	1,104,180,000.00		150,630,000	795,000,000	1,003,800,000	1,104,180,000		65.28%	97.28%	100.00%	100.00%	95.66	36.98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,880,000	1,050,000				35,707,000	11,000,000				77.83%	1047.62%					
Fasilitasi Penataan Administrasi Kepegawaian		85,656,900					58,736,900					68.57%					





**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	
Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya	19,800,000	21,840,000		46,410,000.00	51,051,000.00	19,580,000	-		46,410,000	51,051,000	98.89%	0.00%		100.00%	100.00%	10.00	9.09
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		30,430,000					-					0.00%					
Pengadaan Pakaian Olahraga	10,120,000	-				8,800,000					86.96%						
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
Pembangunan Gedung Kantor	30,276,213,400	58,544,236,000	2,477,000,000	23,497,569,000.00	25,847,325,900.00	28,896,302,500	3,863,892,250	2,387,944,300	23,497,569,000	25,847,325,900	95.44%	6.60%	96.40%	100.00%	100.00%	214.06	(12.38)
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			70,000,000	671,000,000.00	738,100,000.00			69,950,000	671,000,000	738,100,000			99.93%	100.00%	100.00%	434.29	49.33
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	68,572,400	45,912,500	6,000,000	51,205,000.00	56,325,500.00	68,044,000	-	6,000,000	51,205,000	56,325,500	99.23%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	160.86	24.34
Pengadaan peralatan gedung kantor	22,770,000	133,929,500	741,800,000	478,336,400.00	526,170,040.00	21,535,000	77,860,500	716,200,000	478,336,400	526,170,040	94.58%	58.14%	96.55%	100.00%	100.00%	229.14	77.51
Pengadaan Mebeleur	23,850,000	29,593,000	39,000,000	109,797,400.00	120,777,140.00	23,575,000	28,712,000	39,000,000	109,797,400	120,777,140	98.85%	97.02%	100.00%	100.00%	100.00%	61.85	30.44
Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	180,000,000	260,000,000	625,500,000	700,000,000.00	770,000,000.00	180,000,000	260,000,000	625,000,000	700,000,000	770,000,000		100.00%	99.92%	100.00%	100.00%	51.73	30.66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			199,811,000	-	-			196,200,000					98.19%				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,106,000	90,503,200	151,200,000	223,938,000.00	246,331,800.00	36,898,400	34,388,650	135,765,840	223,938,000	246,331,800	36.86%	38.00%	89.79%	100.00%	100.00%	28.90	29.08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11,500,000	5,200,000	12,000,000	39,885,000.00	43,873,500.00	6,852,500	792,000	12,000,000	39,885,000	43,873,500	59.59%	15.23%	100.00%	100.00%	100.00%	79.59	20.99
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			36,750,000	33,250,000.00	36,575,000.00			35,950,000	33,250,000	36,575,000			97.82%	100.00%	100.00%	0.24	0.49
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	771,020,400	200,000,000	398,528,400	-	-	751,833,400	-	381,492,400			97.51%	0.00%	95.73%			12.60	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1,633,777,750	200,000,000				1,567,490,250	-				95.94%	0.00%					
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	36,850,000	12,470,000	118,400,000	88,550,000.00	97,405,000.00	8,789,600	12,470,000	86,541,798	88,550,000	97,405,000	23.85%	100.00%	73.09%	100.00%	100.00%	192.03	34.71
Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	10,346,500	2,950,000	10,000,000	10,000,000.00	11,000,000.00	6,059,500	2,950,000	9,723,900	10,000,000	11,000,000	58.57%	100.00%	97.24%	100.00%	100.00%	44.37	7.55



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	76,543,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000.00	11,000,000.00	71,408,550	7,500,000	7,000,000	10,000,000	11,000,000	93.29%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	(11.72)	(14.39)	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	74,165,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000.00	5,500,000.00	59,533,800	4,590,500	3,276,000	5,000,000	5,500,000	80.27%	30.60%	65.52%	100.00%	100.00%	(34.11)	(22.21)	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	101,833,600	25,000,000	10,000,000	10,000,000.00	11,000,000.00	62,210,600	18,191,000	9,529,000	10,000,000	11,000,000	61.09%	72.76%	95.29%	100.00%	100.00%	(31.36)	(36.96)	
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		10,000,000	8,000,000	8,000,000.00	8,800,000.00		5,500,000	6,256,000	8,000,000	8,800,000		55.00%	78.20%	100.00%	100.00%	(3.33)	14.33	
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD			10,000,000	10,000,000.00	11,000,000.00			8,076,000	10,000,000	11,000,000			80.76%	100.00%	100.00%	5.00	14.17	
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	25,239,250	80,109,500				10,720,250	46,089,500				42.47%	57.53%				217.40	329.93	
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD		17,000,000	17,000,000	27,750,000.00	30,525,000.00		25,086,100	16,659,400	27,750,000	30,525,000	#DIV/0!	147.57%	98.00%	100.00%	100.00%	18.31	(0.38)	
Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	73,438,900	10,000,000	10,000,000	13,812,100.00	15,193,310.00	63,075,900	8,746,100	7,550,000	13,812,100	15,193,310	85.89%	87.46%	75.50%	100.00%	100.00%	(9.57)	(11.89)	
Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Persampahan di Kecamatan	39,084,500					30,303,150												
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah</b>																		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		10,000,000	7,000,000	7,000,000.00	7,700,000.00		10,000,000	6,415,000	7,000,000	7,700,000		100.00%	91.64%	100.00%	100.00%	(5.00)	(9.61)	



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																	
Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	9,999,900	11,698,000				5,049,900	-					50.50%	0.00%				
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>																	
Penyusunan Sistem Informasi Untuk Pelayanan Publik	671,416,500					642,926,500						95.76%					
Pemeliharaan Sistem Informasi Untuk Pelayanan Publik		53,435,000					29,581,750						55.36%				
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>																	
Pembangunan jalan	60,706,865,325	30,923,011,500	136,911,538,310	154,520,434,000	169,972,477,400.00	59,492,728,019	29,995,321,155	135,729,523,315	152,975,229,660	166,573,027,852	98.00%	97.00%	99.14%	99.00%	98.00%	79.14	11.94
Pembangunan Jembatan	10,085,627,150	4,603,596,500	4,834,869,600	3,484,750,000	3,833,225,000.00	9,905,765,050	21,989,809,200	4,435,809,300	3,449,902,500	3,718,228,250	98.22%	477.67%	91.75%	99.00%	97.00%	(16.81)	(73.78)
Pembangunan jalan Lingkungan	55,706,865,325	25,923,011,500	72,589,480,992	37,411,056,000	41,152,161,600.00	53,511,266,550	18,943,047,100	70,505,181,320	37,411,056,000	39,917,596,752	96.06%	73.07%	97.13%	100.00%	97.00%	22.02	(18.41)
Perencanaan Pembangunan Jalan			2,417,434,800														
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	6,214,550,900	829,039,600				6,050,848,100	227,662,000				97.37%	27.46%				(86.66)	(96.24)
<b>Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan</b>																	
Pembersihan Bahu Jalan	806,421,600	730,232,000	818,476,800	887,156,400	975,872,040.00	709,955,600	393,102,400	793,063,500	887,156,400	966,113,320	88.04%	53.83%	96.90%	100.00%	99.00%	5.26	6.15
Pembersihan Parit	490,510,000					386,657,000					78.83%						
<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>																	
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	2,065,933,950	919,895,100	11,351,920,500	1,260,674,950	1,386,742,445.00	1,953,494,950	817,332,000	11,169,224,900	1,260,674,950	1,386,742,445	94.56%	88.85%	98.39%	100.00%	100.00%	249.92	(185.59)
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	1,280,228,050	872,607,100	460,679,600			1,169,680,050	555,116,400	448,228,400			91.36%	63.62%	97.30%			(39.52)	(38.19)
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	6,214,550,900					6,050,848,100											
<b>Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>																	
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	60,706,865,325	30,923,011,500	50,101,875,800	50,907,021,100	55,997,723,210.00	58,278,590,712	30,613,781,385	50,085,630,300	50,907,021,100	55,997,723,210	96.00%	99.00%	99.97%	100.00%	100.00%	6.14	0.53
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	10,085,627,150	4,603,596,500	13,788,800,200	23,405,882,900	25,746,471,190.00	9,883,914,607	4,511,524,570	13,782,271,200	23,405,882,900	25,746,471,190	98.00%	98.00%	99.95%	100.00%	100.00%	56.23	15.78



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>																		
Pemetaan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan			353,239,100	388,563,010.00				353,239,100	388,563,010			100.00%	100.00%	10.00	9.09			
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	108,919,900					68,892,350												
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>																		
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai		8,832,420,300	17,186,425,500	18,905,068,050.00			8,768,148,300	17,186,425,500	18,905,068,050			99.27%	100.00%	100.00%	52.29	29.04		
Pembangunan jaringan rawa		3,236,818,100					3,199,451,600	-	-			98.85%						
Pembangunan Pintu Air			171,000,800	188,100,880.00				171,000,800	188,100,880			100.00%	100.00%	10.00	9.09			
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan rawa		13,539,324,550	20,727,585,100	22,800,343,610.00			13,349,924,204	20,727,585,100	22,800,343,610			98.60%	100.00%	100.00%	31.55	22.34		
Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air		690,461,900	1,312,683,100	1,443,951,410.00			682,767,600	1,286,429,438	1,429,511,896			98.89%	98.00%	99.00%	50.06	28.47		
Database SDA yang berbasis aplikasi			309,347,300	340,282,030.00				309,347,300	340,282,030			100.00%	100.00%	10.00	9.09			
<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>																		
Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa		351,965,000				-	350,190,000					99.50%						
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	1,965,500																	
<b>Program Pengendalian Banjir</b>																		
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai		1,203,420,800				-	1,185,812,800					98.54%						
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		393,755,050				-	350,116,601					88.92%						
Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Pengendalian Banjir		403,203,000				-	401,216,000					99.51%						
Pembangunan prasarana pengendalian banjir		403,778,000				-	398,218,000					98.62%						



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>																			
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	752,682,700	411,464,500	887,942,500	719,405,500	791,346,050.00	746,027,700	-	792,646,714	719,405,500	791,346,050								15.37	(0.27)
<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>																			
Survey dan pemetaan	161,251,700	170,340,000	763,682,500	64,492,500	70,941,750.00	159,255,200	120,060,010	721,816,600	64,492,500	70,941,750	98.76%	70.48%	94.52%	100.00%	100.00%			68.10	(237.84)
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	25,151,700	89,830,000	275,380,000			17,475,700	17,194,910	105,897,902			69.48%	19.14%	38.46%					231.85	41.08
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	40,823,200	117,125,100	199,933,000	93,800,500	103,180,550.00	29,553,200	11,997,600	81,900,915	84,420,450	98,021,523	72.39%	10.24%	40.96%	90.00%	95.00%			53.63	10.70
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	218,869,300	268,060,000	325,707,000	375,000,000	412,500,000.00	173,062,300	84,607,500	270,331,837	345,000,000	371,250,000	79.07%	31.56%	83.00%	92.00%	90.00%			17.28	11.58
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>																			
Pengawasan pemanfaatan ruang	170,108,500	237,297,000	249,614,500	336,941,500	370,635,650.00	150,723,500	100,738,500	219,647,500	313,355,595	333,572,085	88.60%	42.45%	87.99%	93.00%	90.00%			22.42	14.23
Penyusunan SKRK dan Dokumen Teknis IMB		97,100,000	122,151,000					22,097,000					18.09%						
Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi			24,000,000					20,000,000					83.33%						
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	53,491,400					22,820,400					42.66%								
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3,636,100					3,636,100													
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung	3,759,900					1,116,700													
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan	3,408,600					1,113,900													
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>																			
Pemeliharaan RTH			2,254,465,400	1,804,878,600	1,985,366,460.00			2,154,459,300	1,624,390,740	1,826,537,143			95.56%	90.00%	92.00%			(4.97)	(10.78)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH				100,000,000	110,000,000.00				100,000,000	110,000,000				100.00%	100.00%			10.00	9.09
Penyusunan Program Pengembangan RTH	153,968,500					151,638,500					98.49%							(100.00)	(100.00)
Pemeliharaan Taman	3,868,658,750	1,672,811,600				3,627,464,000	1,151,217,100				93.77%	68.82%						(56.76)	(68.26)
<b>Program Pengelolaan Areal Pemukiman</b>																			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	3,286,546,200	2,061,667,000				3,173,845,200	169,451,000												



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>																	
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	416,587,600	426,129,975	365,541,000	729,135,000	802,048,500.00	357,794,400	5,408,980,400	355,999,484	729,135,000	802,048,500	85.89%	1269.33%	97.39%	100.00%	100.00%	24.38	13.16
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	21,744,667,150	10,295,583,325	13,158,772,496	13,547,837,400	14,902,621,140.00	20,545,685,100	5,171,467,000	12,859,227,500	13,547,837,400	14,604,568,717	94.49%	50.23%	97.72%	100.00%	98.00%	(2.97)	(0.68)
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			235,352,000		-			230,365,000					97.88%			(100.00)	(100)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			100,538,000	83,513,000	91,864,300.00			96,468,600	83,513,000	87,271,085			95.95%	100.00%	95.00%	(3.47)	(5.60)
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan				80,622,600	88,684,860.00				80,622,600	88,684,860				100.00%	100.00%	10.00	5.00
Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan				138,134,800	151,948,280.00				138,134,800	151,948,280				100.00%	100.00%	10.00	5.00
Pengelolaan Pemungutan Persampahan				1,469,913,550	1,616,904,905.00				1,469,913,550	1,616,904,905				100.00%	100.00%	10.00	5.00
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>																	
Pengembangan sistem distribusi air minum	2,930,434,200	1,633,724,600	8,398,384,894	5,933,750,000	6,527,125,000.00	2,882,506,200	186,710,000	4,992,421,874	5,340,375,000	6,200,768,750	98.36%	11.43%	59.45%	90.00%	95.00%	87.62	5.78
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	440,106,900					434,393,900					98.70%					(100.00)	(100.00)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	229,778,150					224,348,150					97.64%					(100.00)	(100.00)
Penyediaan penampungan air hujan (PAH)	109,897,650					109,897,650					100.00%					(100.00)	(100.00)
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>																	
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2,521,180,600	1,333,659,600	4,566,988,900	1,499,200,000	1,649,120,000.00	2,497,880,700	39,840,000	319,699,868	1,499,200,000	1,649,120,000	99.08%	2.99%	7.00%	100.00%	100.00%	34.54	19.22
<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>																	
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6,573,503,850	3,105,249,600	3,419,669,600	3,585,750,000	3,944,325,000.00	6,403,836,700	1,763,258,050	3,370,519,300	3,549,892,500	3,904,881,750	97.42%	56.78%	98.56%	99.00%	99.00%	(6.94)	(2.66)



**DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>									-	-								
Pengaturan dan penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi				63,851,500	70,236,650.00				63,851,500	70,236,650				100.00%	100.00%	10.00	5.00	
<b>Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>									-	-								
Pemberdayaan penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perorangan, Badan Usaha)				172,855,000	190,140,500.00				172,855,000	190,140,500				100.00%	100.00%	10.00	5.00	
<b>Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum</b>									-	-								
Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum	2,185,820,050	2,089,635,800	2,335,575,000	150,575,000	165,632,500.00	2,092,623,050	1,158,171,800	2,323,052,000	146,057,750	160,663,525	95.74%	55.42%	99.46%	97.00%	97.00%	(19.05)	(368.98)	
Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	1,194,510,000	604,396,900	14,859,754,500	7,225,864,500	7,948,450,950.00	1,143,974,500	347,950,000	13,748,989,248	7,081,347,210	7,551,028,403	95.77%	57.57%	92.53%	98.00%	95.00%	566.96	(15.01)	





### BAB 3

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUBU RAYA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai Isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur sumber daya air, kebinamargaan keciptakaryaan, penataan ruang, kebersihan, pertamanan, dan penerangan jalan umum kepada masyarakat. Isu dan Permasalahan yang mendesak anatara lain sebagai berikut :

Beberapa permasalahan yang menjadi prioritas penyelesaian pada sektor sumber daya air, kebinamargaan keciptakaryaan, penataan ruang, kebersihan, pertamanan, dan penerangan jalan umum diantaranya adalah :

#### 1. Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan akibat jaringan drainase dan saluran yang belum memadai di bidang Sumber Daya Air. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan :

- a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi pada saluran sungai;
- b. Pendangkalan dan penyempitan saluran ( Sungai );
- c. Belum terintergrasinya sistem jaringan drainase dari satu kawasan lainnya;

Naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan.

#### 2. Sungai

Selama ini paradigma sungai sebagai bagian paling belakang dan kurang diperhatikan estetikanya. Paradigma ini harus diubah dan harus memperhatikan factor estetika dan sanitasi lingkungan sehingga dapat mendukung sektor pariwisata.



3. Masalah Sempadan Sungai

Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai merupakan penyebab kekumuhan dan gangguan aliran sungai. Pengumpulan (konglomerasi) permukiman kumuh banyak dimulai dari dua daerah ini. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganan kota karena sungai merupakan potret dari sebuah peradaban masyarakat kota.

4. Pengembangan Kabupaten Kubu Raya

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan.

Pengembangan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan selama ini dirasakan belum optimal. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh :

- a. Kondisi awal saat pemekaran wilayah kabupaten, jaringan jalan dan jembatan yang tersedia dalam kondisi rusak dan belum memiliki perkerasan;
- b. Panjang jalan yang belum sesuai dengan sebaran penduduk dan sistim aktivitas yang padat;
- c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi sehingga mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat
- d. Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah rawan banjir dan diperlukan konstruksi jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, namun konstruksi jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement)/aspal.

5. Keawetan Konstruksi Jalan

Pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagian besar masih menggunakan metode manual sehingga hasilnya kurang sempurna baik terhadap kualitas dan umur konstruksi dibanding bila



dilaksanakan dengan metode mekanis, sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat ketahanan konstruksi.

6. Daerah Perbatasan Antar Wilayah

Daerah perbatasan antar wilayah, khususnya yang transportasinya dilayani dengan jalan lokal masih merupakan wilayah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah ini harus mendapat perhatian khusus.

7. Keciptakarya, Penataan Ruang, Kebersihan , Pertamanan serta Penerangan Jalan Umum

Berkaitan dengan sub fungsi pelayanan umum, jenis pelayanan umum jasa konstruksi yang ditangani Bidang Cipta Karya permasalahannya adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>
- Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	- Perlunya Perda tentang rencana tapak, dan RDTR - Rentang waktu pelayanan - Kewenangan Kecamatan dalam menertibkan ijin mendirikan bangunan (IMB)
- Tata letak Bangunan Gedung	- Perda kebijakan teknis Tata letak bangunan gedung
- Sarana air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	- Penyediaan Sarana air Minum dan Penyehatan Lingkungan - Perlu diadakan studi kajian kelayakan air minum

Berkaitan dengan sub fungsi Penataan Ruang dan jenis kegiatan yang ditangani Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum beserta



permasalahannya adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>
- Penyusunan dokumen rencana tata ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis	- Belum keluarnya rekomendasi dan revisi RDTRK dari Pemprov terhadap beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Belum tersedianya foto udara dan peta garis skala 1:5000 untuk seluruh kawasan - Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Kubu Raya memiliki rencana detail disertai dengan peraturan zona.
- Pengawasan dan penertiban Pelanggaran Penataan Ruang	- Kurangnya sarana dan prasarana - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengawasan penertiban

Berkaitan dengan sub fungsi pelayanan umum, jenis pelayanan umum Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang ditangani Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan permasalahannya adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>
-----------------------	---------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Persampahan/ kebersihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya Masterplan Pengelolaan Persampahan</li> <li>- Kurangnya Sarana dan Prasarana (Sarana angkutan, tong sampah, TPSS)</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan persampahan.</li> <li>- Rendahnya retribusi kebersihan</li> <li>- Belum Optimalnya kewenangan kecamatan dalam pengelolaan kebersihan</li> <li>- Belum aktifnya pelibatan masyarakat desa/kelurahan, RT,RW dalam menangani masalah persampahan.</li> </ul>
---	---

Berkaitan dengan sub fungsi manajemen persampahan dan limbah, jenis kegiatan yang ditangani Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum beserta permasalahannya adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Permasalahannya</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Teknologi pengelolaan sampah di sumber dan di TPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengembangan teknologi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana</li> <li>- Rendahnya Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyuluhan/sosialisasi</li> </ul>



- Pemeliharaan dan optimalisasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	- Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sarana IPAL yang ada
- Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga	- Masih rendahnya cakupan pelayanan sarana limbah rumah tangga

Berkaitan dengan sub fungsi pertamanan dan penerangan jalan umum, jenis kegiatan yang ditangani Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Permasalahannya</b>
- Pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota	- Belum disusunnya RDTR - Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Kubu Raya memiliki rencana detail disertai dengan peraturan zonasi. - Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pemeliharaan Taman Kota	- Kurangnya sarana dan prasarana - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pemeliharaan.
- Penerangan Jalan Umum	- Kurangnya Sarana dan Prasarana - Daya yang tersedia oleh PLN - Peran serta masyarakat menjaga sarana PJU yang telah terpasang
- Pelayanan ijin	- Perlunya Block Plan TPU di



pemakaman	Kabupaten Kubu Raya
-----------	---------------------

### 3.2 KONDISI SEKARANG DAN PROYEKSI KE DEPAN

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan diatas, perlu disusun strategi yang lebih tajam dan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan dalam kondisi sekarang dan kondisi yang di inginkan seperti dibawah ini :

#### ❖ **Kondisi yang sekarang**

##### 1. **Bidang Sumber Daya Air :**

- a. Banyaknya bangunan irigasi / rawa yang dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat sehingga memerlukan pemeliharaan rutin dan berkala.
- b. Banyaknya daerah yang mengalami banjir sehingga memerlukan program normalisasi sungai dan pengendalian banjir di setiap daerah rawan banjir.
- c. Banyak daerah yang memerlukan keseterdiaan air yang baik oleh karena diperlukan program penyediaan dan pengolahan air baku bagi daerah kekurangan air baku.
- d. Minimnya sarana dan prasarana serta personil ahli sumber daya air.
- e. Banyaknya daerah yang mengalami banjir akibat curah hujan sehingga memerlukan program baru untuk mengatasinya

##### 2. **Bidang Bina Marga :**

- a. Ketersediaan jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan program kerja di Bidang Bina Marga (perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan jalan dan jembatan).
- b. Kemampuan dan keterampilan SDM di bidang Bina Marga yang masih harus ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan





pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kerja guna menunjang program tersebut diatas.

- c. Minimnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja, terutama yang berkaitan sarana survey, penelitian, mobilitas dan sebagainya.

Dalam hal permasalahan yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya maka dibutuhkan pada tahun-tahun berikut untuk mencapai program-program yang telah direncanakan dengan matang seperti di bawah ini :

❖ **Kondisi yang diinginkan**

**1. Bidang Sumber Daya Air:**

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan uraian seperti ini:
  - a) Kegiatan Pembanguna Pintu Air dengan indikator 220 unit.
  - b) Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai dengan indikator 1.750 km.
  - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air dengan indikator 330 unit.
  - d) Pemeliharaan Petani Pemakai Air dengan indikator 988 Ha.
  - e) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa (Ha) dengan indikator 5.339 Ha.
  - f) Rahabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa dengan indikator 15.000 Ha.
  - g) Kegiatan Monitoring dan Evalusai
2. Program Pengendalian Banjir dengan uraian seperti berikut:
  - a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeriharaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan indikator 120 m.
  - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Pusat-Pusat Pengendali Banjir dengan indikator 9.100 m.
  - c) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir dengan indikator 58.500 m.
  - d) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan indikator 500 m.



- e) pembuatan embung resapan permukiman dan hasil resapan akibat curah hujan dapat dipergunakan juga untuk konsumsi rumah tangga atau menjadi air baku rumah tangga
  - f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan indikator 5 paket.
3. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dengan uraian seperti berikut:
- a) Kegiatan Pembanguna Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.
  - b) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.
  - c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
4. Program Perencanaan dengan uraian seperti berikut:
- a) Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa.
  - b) Kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir.
  - c) Kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
5. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dengan uraian seperti berikut:
- a) Kegiatan Pengadan Alat Tebas Rumput.
  - b) Kegiatan Pengadaan Excavator Mini.
  - c) Kegiatan Pengadaan Speed Boat.
  - d) Kegiatan Pengadan Sepeda Motor Roda 2.
  - e) Kegiatan Pengadan Sepeda Motor Roda 3.
  - f) Kegiatan Pengadaan GPS.
  - g) Kegiatan Pengadaan Printer.
  - h) Kegiatan Pengadaan Laptop.
  - i) Pemeliharaan Peralatan dan Suku Cadang.

2. **Bidang Bina Marga :**

- a. Tersedianya data base perencanaan program yang lengkap dan valid melalui kegiatan survey dan pemutakhiran data pendukung perencanaan (program dan teknis) guna mendukung kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan desa (berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan) dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusunan



pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten (termasuk jembatan dan jalan desa), penetapan status jalan kabupaten (termasuk jembatan dan jalan desa) dan penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten (termasuk jalan desa). Seperti program yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang diuraikan seperti ini:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan indikator kinerja program terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
  2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan indikator kinerja program terwujudnya ketahanan badan jalan dan sungai yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat di daerah yang berdekatan dengan konstruksi tersebut.
  3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indikator kinerja program terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
- b. Secara terprogram melakukan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para SDM (aparatur) penyelenggara jalan kabupaten (termasuk jalan desa) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah melalui Institusi maupun lembaga yang berkompeten dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal penyusunan rencana (program dan teknis)
  - c. Tercukupinya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja terutama yang berkaitan sarana survey, penelitian, mobilitas dan sebagainya.

### 3. Bidang Cipta karya

Upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Cipta Karya, Tata



Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kubu Raya berkaitan dengan permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Upaya memperpendek rentang waktu pelayanan ijin mendirikan bangunan (IMB) antara lain dengan :
  - ✓ Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - ✓ Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) yang mengatur lebih lanjut tentang proses perijinan
2. Pembuatan kajian akademis untuk rancangan peraturan daerah (Raperda) Tata Bangunan

Perlunya study kelayakan tentang sarana air minum yang bersih

#### 4. Bidang tata Ruang

Upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum berkaitan dengan permasalahannya yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan teknis ruang kawasan (Land use Plan, dan Block plan)
2. Penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)

#### 5. Bidang Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum

Upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum berkaitan dengan permasalahannya yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan kajian pengelolaan persampahan di Kabupaten Kubu Raya melalui Solid Waste Improvement Program (SWIP) dan Perda Pengelolaan Persampahan pada tahun 2013  
Penyedia sarana tong sampah, gerobak sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), unit pengelolaan sampah (UPS), Penyedia sarana angkutan sampah.
1. Mengikutsertakan personil dalam seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan berkembangnya teknologi pengelolaan sampah.



2. Kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan teknologi pengolahan sampah.
  3. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis 3R Peningkatan penyediaan sarana prasarana limbah berbasis masyarakat melalui peningkatan program sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).
  4. Pengadaan dan Penanaman pohon pelindung
  6. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
7. *Bidang Seketariat :*
1. Program pelayanan adminitrasi perkantoran
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional
    - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
    - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - f) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
    - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - i) Penyediaan Makanan dan Minuman
    - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
    - k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
    - l) Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)
    - m) Penunjang Jasa Adminitrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur
    - a) Pembangunan Gedung Kantor
    - b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
    - c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
    - e) Penyediaan sewa Gedung/Kantor/Tempat
    - f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
    - h) Pemeliharaan rutin/berkala komputer



- i) Rehabilitasi Sedang / berat rumah dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - b) Penyusunan evaluasi jabatan SKPD
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
  - a) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
  - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  - c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - d) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - e) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD

### **3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019.

#### **Visi Kabupaten Kubu Raya**

***“ Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing“***

Makna dari visi tersebut adalah :

Maju : Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan di bidang peningkatan kesejahteraan



- masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi
- Harmonis dan Berbudaya : masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki akhlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik
- Memiliki Daya Saing : Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif

#### **Misi Kabupaten Kubu Raya**

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kubu Raya, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (Good Governance)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreatifitas
3. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi sesuai Potensi Wilayah
4. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian PU**

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.





Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

1. Tantangan pembangunan. sub bidang SDA

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
- Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi  $\pm 100.000$  Ha per tahun.
- Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
- Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

2. Isu strategis. sub bidang SDA

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2 juta ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta ha daerah irigasi yang belum dapat





berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

- Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal dimana dari 33,4 juta ha lahan rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan Pemerintah.
- Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.
- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Prasarana SDA.
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.



- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatanbidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
  - Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembanganinfrastruktur SDA.
3. Tantangan pembangunan. sub bidang jalan
- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasinasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasanlingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalammemanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
  - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sertaoperasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memilikiterhadap prasarana jalan yang ada.
  - Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbanganpembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan TimurIndonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.
  - Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguanbencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan,disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
  - Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan demand approach) yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
  - Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama



dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

#### 4. Isu strategis. sub bidang jalan

- Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 11 (sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
- Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama di 8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota-kota nonmetropolitan. Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan industri, pelabuhan laut (*outlet*) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan.
- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar terutama pintu gerbang Negara Kesatuan RI (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan nasional.



- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor.

### **3.5 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat**

#### **Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat**

**“ Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Serta Perumahan Yang Handal, Berbudaya dan Berkelanjutan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Menuju Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat”**

#### **Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mendorong terwujudnya Perumahan yang layak huni dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta *legitimate*
2. Meningkatkan dan mempertahankan kemampuan pelayanan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
3. Meningkatkan infrastruktur di bidang sumber daya air berlandaskan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air
4. Mewujudkan permukiman di perkotaan, perdesaan dan kawasan pesisir, pulau-pulau terkecil, pulau-pulau terluar yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan



5. Mewujudkan pelayanan prima yang optimal di bidang mutu konstruksi dan mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan
6. Meningkatkan pelayanan minimal di bidang ke PU-an, perumahan dan tata ruang melalui aparatur yang bersih, profesional, beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik maksimal

### **3.6 Telaahan RTRW dan KLHS**

Pembahasan RTRW untuk pembuatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Naional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, dan memperhatikan RTRW Propinsi Kalimantan Barat, meskipun pada saat ini RTRW Kabupaten Kubu Raya masih dalam tahap pembahasan untuk proses penetapan dengan Peraturan Daerah namun rencana pembangunan infrastruktur pada program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya telah direncanakan dalam rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagaimana table berikut :



Tabel 3.6  
Kajian Pengaruh dan Mitigasi  
Dampak Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikasi Program	Dampak	Rumusan		KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	(-)Meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan turunnya produksi pertanian (-)Mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan runoff, dan menimbulkan banjir pada tempat-tempat tertentu, (-) Mengurangi secara signifikan keanekaragaman hayati (-) Pemakaian material berakibat pada perubahan bentang alam (-)Meningkatkan pencemaran lingkungan kebisingan,polusi	1. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dengan mempertimbangkan prioritas azas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. 2. Intensifikasi pertanian melalui teknologi pertanian, (bibit unggul, sarana produksi pertanian organik, pertanian hemat air. 3. pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak mengenai lingkungan dan badan jalan. 4. Pemanfaatan	1. Mempertahankan sawah lestari. 2. Pengalihan trase jalan 3. Pembangunan	<input type="checkbox"/> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya	Pembangunan jalan dan jembatan harus dilakukan dengan: Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif. Memperhatikan kesatuan masyarakat secara sosial agar tidak terpisah. Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan.. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang



		udara (-) Pemisahan lokasi komunitas karena pengrusakan dan putusannya akses	area di sekitar lokasi			pengendalian).
		(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Menimbulkan konflik sosial	pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 5. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 6. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin			
2	Program Peningkatan Jalan	(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat	1. Penggunaan material diutamakan dari lokasi	Pemanfaatan kembali material jalan	Dinas Pekerjaan Umum	□ Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan harus





dan Penggantian Jembatan	penggunaan material (-)Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (- )Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan	penambahan yang berizin 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang	dengan menggunakan alat <i>cold milling</i> .	dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya	dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan. Upaya pemanfaatan kembali/daur ulang material jalan yang ada, seperti: aspal
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	(-)Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Meningkatkan pencemaran udara	1. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambahan yang berizin 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan	Pemanfaatan kembali material jalan dengan menggunakan alat <i>cold milling</i> .	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas melalui





	<p>atan dan kebisingan (-) Peningkatan suhu di permukiman sekitar, contoh; dari</p>	<p>dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan.</p> <p>3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang</p>		<p>Kubu Raya</p>	<p>pengurangan dampak kebisingan, kemacetan, pencemaran, suhu dan memperlancar aliran air serta RTH</p>
--	---	--	--	------------------	---

### 3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga sebagai berikut :

1. Kondisi jalan, jembatan dan turap/talud/beronjong sarana pemerintah daerah yang sebagian besar belum dalam kondisi yang layak mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Kondisi jalan, jembatan dan turap/talud/beronjong tidak layak jalan (rusak) yang merupakan salah satu indikator akses ke suatu tujuan menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang lama perlu segera mendapatkan penanganan.
3. Masih rendahnya cakupan layanan sumber air baku terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.



4. Kondisi jaringan irigasi masih banyak yang belum dibuat/diperbaiki, mengakibatkan menurunnya hasil panen petani sehingga mengganggu aktivitas produksi hasil panen petani ke pasar dan masyarakat.
5. Kondisi sungai yang perlu diperhatikan karena pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sampah.
6. Kondisi pengendalian banjir pada tanggul-tanggul pengendalian banjir yang akan mengakibatkan lumpuh akses dan perekonomian.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar belum tersedia secara permanen (masih menyewa) mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
3. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
4. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu dimusim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat.
5. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
6. Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penataan ruang.
7. Pemilahan dan penanganan sampah belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah.
8. Masih terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan persampahan



9. Penegakkan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/amanat peraturan perundangan.

## **BAB 4**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun, yang menggambarkan arah strategi organisasi.

Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
- g. Rumusan Tujuan harus menverminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan yaitu Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakaryaannya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

#### **4.2 SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya untuk dapat menjalankan Visi dan Misinya adalah:

1. Terwujudnya Tertib administrasi untuk pelayanan pada aparatur dan masyarakat
2. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD
4. Terwujudnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik.
5. Terwujudnya Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik.
6. Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan jembatan
7. Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan
8. Terwujudnya jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi
9. Meningkatnya pengelolaan pengendalian banjir dan pengelolaan air baku
10. Meningkatnya kesesuaian tata ruang sesuai peruntukannya
11. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang)
12. Meningkatnya system pengelolaan persampahan
13. Meningkatnya kualitas pengelolaan Sampahan
14. Meningkatnya jumlah wilayah yang dialiri air bersih
15. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata



Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakarya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1 Persentase Infrastruktur Jalan, Jembatan, SDA, Prasarana dan Sarana keciptakarya, ketataruangan, Kebersihan, Pertamanan dan PJU	1 Terwujudnya Tertib administrasi untuk pelayanan pada aparatur dan masyarakat	1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP				B	B



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

			4	Terwujudnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik	1	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik/mantap (%)	32.00	34.00	59.00	64.00	69.00
					2	Persentase kondisi jalan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%)	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00
					3	Panjang jalan kabupaten terbangun (km)	46.00	51.00	56.00		
					4	Panjang jalan lingkungan terbangun (km)	390.00	465.00	365.00		
			5	Terwujudnya kualitas jembatan dalam kondisi baik	1	Persentase kondisi jembatan kabupaten dalam keadaan baik/mantap (%)				74.40	80.00
					2	Persentase kondisi jembatan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%)				35.00	37.50
			6	Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan jembatan	1	Panjang jembatan terbangun pada jalan kabupaten (meter)	80.00	100.00	125.00		
					2	Panjang jembatan terbangun pada jalan lingkungan (meter)	612.00	702.00	312.00		
					3	Jumlah jembatan yang diperbaiki dan dibangun (Unit)	12.00	13.00	14.00		
			7	Terwujudnya jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi (%)				80.00	85.00
					2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi yang mengalir luas sawah (%)				30.00	35.00



			11	Meningkatnya kesesuaian tata ruang sesuai peruntukannya	1	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00		
					2	Rasio RTH (Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan)	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
					3	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang) (%)	72.00	77.00	82.00		
			12	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang)	1	Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00
			13	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan	1	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan				75.00	77.50
					2	Persentase desa yang di aliri air bersih				32.00	47.00
			14	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sampah	1	Persentase sampah yang di tangani (%)				60.00	65.00





			15	Meningkatnya system pengelolaan persampahan	1	Persentase cakupan pelayanan persampahan	22.00	29.00	36.00		
					2	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%)	16.00	17.00	18.00		
					3	Persentase pengangkutan sampah	58.00	61.00	64.00		
					4	Persentase pengoperasian TPA	20.00	32.50	45.00		
			16	Meningkatnya jumlah wilayah yang dialiri air bersih	1	Jumlah wilayah kecamatan yang dialiri air bersih	5.00	7.00	9.00		
					2	Persentase Cakupan pelayanan air bersih perdesaan	5.70	5.97	6.00		
					3	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	70.00	72.93	75.88		
					4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	48.00	51.00	51.03		



## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

##### 5.1.1 STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan yang dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya.

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya untuk dapat menjalankan Visi dan Misinya adalah:

1. Mendorong keterlibatan dan peranserta aktif stakeholder dalam proses perencanaan bangunan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Meningkatkan nilai hasil Evaluasi SAKIP
4. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi
5. Menetapkan rencana umum dan rencana rinci Kabupaten Kubu Raya
6. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang
8. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang
9. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy

#### 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya untuk dijadikan Pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, misi, dan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya.

Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel.
2. Memberikan akses informasi system perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)



3. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
4. Perbaikan Penyusunan RENSTRA, Lakip, IKU dan Tapkin SKPD
5. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah
6. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman
7. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentraproduksi dan akses pasar
8. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta Meningkatnya kelestarian fungsi dan manfaat sungai, danau, pantai, waduk dan rawa konservasi dalam hal pengendalian banjir dan pengembangan pengelolaan sumber air baku
9. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir
10. Pengembangan energy alternative dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbaru
11. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan
12. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
13. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan
14. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat
15. Penetapan ruang terbuka hijau
16. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
17. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif
18. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak
19. Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
20. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi
21. Penambahan petugas pengelola persampahan
22. Memberikan jaminan dan perlindungan social dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan
23. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah
24. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih



**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing</b>							
<b>MISI 1 : Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)</b>							
<b>SASARAN : Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
<b>(1)</b>		<b>(3)</b>		<b>(10)</b>		<b>(11)</b>	
1	Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakaryaannya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1	Terwujudnya Tertib administrasi untuk pelayanan pada aparatur dan masyarakat	1	Mendorong keterlibatan dan peranserta aktif stakeholder dalam proses perencanaan bangunan	1	Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel
						2	Memberikan akses informasi system perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional
						2	Pengkajian dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
						3	Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
		3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai SAKIP	1	Perbaikan Penyusunan RENSTRA, Lakip, IKU dan Tapkin SKPD



**MISI 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat**

**SASARAN : Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(3)		(10)		(11)	
1	Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakaryaannya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1	Terwujudnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik	1	Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi	1	Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah
		2	Terwujudnya kualitas jembatan dalam kondisi baik			2	Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman
		3	Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan jembatan			3	Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentraproduksi dan akses pasar
		4	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan				
		1	Meningkatnya pengelolaan jaringan pengairan , pengendalian banjir dan pengelolaan air baku	1	Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana irigasi	1	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta Meningkatkan kelestarian fungsi dan manfaat sungai, danau, pantai, waduk dan rawa konservasi dalam hal pengendalian banjir dan pengembangan pengelolaan sumber air baku
		2	Terwujudnya jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi				
		3	Meningkatnya pengelolaan pengendalian banjir dan pengelolaan air baku				
		4	Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	1	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	1	Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir
						2	Pengembangan energy alternative dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbaru



**SASARAN : Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(3)		(10)		(11)	
1	Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakarya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1	Meningkatnya kesesuaian tata ruang sesuai peruntukannya	1	Menetapkan rencana umum dan rencana rinci Kabupaten Kubu Raya	1	Pemanfaatan ruang sesuai dengan tatar ruang yang telah ditetapkan
		2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang)	2	Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan	1	Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
						2	Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan
				3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang	1	Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat
				4	Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang	1	Penetapan ruang terbuka hijau
				5	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1	Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang



SASARAN : Meningkatnya layanan air bersih dan persampahan									
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
(1)		(3)		(10)		(11)			
1	Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Ciptakarya, Ke-Tataruangan dan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1	1	Meningkatnya system pengelolaan persampahan	1	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1	Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif	
			2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sampahan			2	Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak	
							3	Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan	
							4	Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi	
				2		2	Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan	1	Penambahan petugas pengelola persampahan
								2	Memberikan jaminan dan perlindungan social dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan
				3	Meningkatnya jumlah wilayah yang dialiri air bersih	1	Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	1	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas
								2	Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah
								3	Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih



## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dapat di lihat pada table 6.1 sebagai berikut:





Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)				Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1 Mewujudkan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, Prasarana dan Sarana Ke-Cipta karya, Ke-Tatarusahan dan Keberhasilan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	1 Terwujudnya Tertib administrasi untuk pelayanan pada aparaturnya dan masyarakat		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	10,288,703,150	100%	11,633,990,365	100%	1,766,852,813	100%	2,086,324,200	100%	2,294,956,620	100%	1,766,852,813			
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		100%	9,761,000,000	100%	10,737,100,000	100%	142,800,000	100%	156,200,000.00	100%	171,820,000.00	100%	142,800,000	DFUPR	Lingk. DFUPR	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional							100%	122,204,813	100%	121,501,300.00	100%	133,651,430.00	100%	122,204,813		
			3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		100%	13,200,000	100%	14,520,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	50,000,000			
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		100%	92,000,000	100%	101,200,000	100%	8,364,800	100%	15,182,700.00	100%	16,700,970.00	100%	8,364,800			
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	40,312,300	100%	44,343,530	100%	117,361,000	100%	150,002,600.00	100%	165,002,860.00	100%	117,361,000			
			6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100%	25,004,600	100%	27,505,060	100%	34,768,600	100%	30,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	34,768,600			
			7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	5,806,400	100%	6,387,040	100%	11,393,600	100%	17,053,600.00	100%	18,758,960.00	100%	11,393,600			
			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	7,528,000	100%	8,280,800	100%	8,760,000	100%	8,760,000.00	100%	9,636,000.00	100%	8,760,000			
			9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	39,000,000	100%	39,000,000.00	100%	42,900,000.00	100%	39,000,000			
			10 Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana untuk Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		100%	111,270,000	100%	122,397,000	100%	258,000,000	100%	252,320,000.00	100%	277,552,000.00	100%	258,000,000			
			11 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Dana untuk Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah		100%	88,260,050	100%	97,086,055	100%	150,000,000	100%	232,505,000.00	100%	255,755,500.00	100%	150,000,000			
			12 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya SOP		100%	83,441,800	100%	91,785,980	100%	7,000,000	100%	9,999,000.00	100%	10,998,900.00	100%	7,000,000			
			13 Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran				100%	230,760,000	100%	817,200,000	100%	1,003,800,000.00	100%	1,104,180,000.00	100%	817,200,000			
			14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		100%	45,880,000	100%	50,466,000								0%	-		
15 Fasilitas Penataan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Fasilitas Penataan Administrasi Kepegawaian							100%	85,656,900						0%	-				

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**



			II.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin kerja PNS	100%	29,920,000	100%	52,270,000	-	100%	46,410,000	100%	51,051,000	-				
			1	Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas serta perlengkapannya	100%	19,800,000	100%	21,840,000		100%	46,410,000.00	100%	51,051,000.00	0%	-	DPUPR	Lingk. DPUPR	
			2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		-	100%	30,430,000					0%	-				
			3	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya Pakaian Olahraga	100%	10,120,000		-					0%	-				
			III.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	33,087,809,950	100%	58,729,374,200	100%	4,757,589,400	100%	25,804,980,800	100%	28,385,478,880	100%	4,757,589,400		
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	100%	30,276,213,400	100%	57,964,236,000	100%	2,477,000,000	100%	23,497,569,000	100%	25,847,325,900.00	100%	2,477,000,000	DPUPR	Lingk. DPUPR
			2	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional					100%	70,000,000	100%	671,000,000.00	100%	738,100,000.00	100%	70,000,000		
			3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	68,572,400	100%	45,912,500	100%	6,000,000	100%	51,205,000.00	100%	56,325,500.00	100%	6,000,000		
			4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	22,770,000	100%	133,929,500	100%	741,800,000	100%	478,336,400.00	100%	526,170,040.00	100%	741,800,000		
			5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100%	23,850,000	100%	29,593,000	100%	39,000,000	100%	109,797,400.00	100%	120,777,140.00	100%	39,000,000		
			6	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Tersedianya dana untuk sewa gedung kantor	100%	180,000,000	100%	260,000,000	100%	625,500,000	100%	700,000,000.00	100%	770,000,000.00	100%	625,500,000		
			7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor					100%	199,811,000		-	-	100%	199,811,000			
			8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100,106,000	100%	90,503,200	100%	151,200,000	100%	223,938,000.00	100%	246,331,800.00	100%	151,200,000		
			9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	11,500,000	100%	5,200,000	100%	12,000,000	100%	39,885,000.00	100%	43,873,500.00	100%	12,000,000		
			10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer					100%	36,750,000	100%	33,250,000.00	100%	36,575,000.00	100%	36,750,000		
			11	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	100%	771,020,400	100%	200,000,000	100%	398,528,400		-	-	100%	398,528,400			
			12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	1,633,777,750								0%	-			
			IV.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tersedianya peraturan tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi		-		-		1 Perbup	63,851,500	1 Perbup	70,236,650		-			
			1	Pengaturan dan penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Peraturan Ijin Usaha Jasa Konstruksi						1 Perbup	63,851,500	1 Perbup	70,236,650	0%	-			
			V.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersedianya peraturan tentang penyedia Jasa Konstruksi		-		-		50 Penyedia	172,855,000	50 Penyedia	190,140,500		-			
			1	Pemberdayaan penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perorangan, Badan Usaha)	Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi						50 Penyedia	172,855,000	50 Penyedia	190,140,500	0%	-			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA



				VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur		100%	47,196,500	100%	54,660,800	100%	128,400,000	100%	98,550,000	100%	108,405,000	100%	128,400,000			
				1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PMS yang mengikuti Bimtek		4 PMS	86,850,000	5 PMS	49,660,800	12 PMS	118,400,000	9 PMS	88,550,000.00	9 PMS	97,405,000.00	12 PMS	118,400,000	DFUPR	Lingk. DFUPR	
				2	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah PMS dalam penyusunan evaluasi Jabatan SKPD		5 PMS	10,846,500	5 PMS	5,000,000	5 PMS	10,000,000	5 PMS	10,000,000.00	5 PMS	11,000,000.00	5 PMS	10,000,000			
		2	Terwujudnya Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	VII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	175,998,600	100%	50,000,000	100%	83,000,000	100%	83,000,000	100%	86,300,000	100%	83,000,000			
				1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan		1 Laporan	74,165,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,500,000.00	1 Laporan	5,000,000			
				2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan		1 Laporan	101,888,600	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	11,000,000.00	1 Laporan	10,000,000			
				3	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,800,000.00	1 Dokumen	8,000,000			
				4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Jumlah Laporan					1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	11,000,000.00	1 Laporan	10,000,000				
				VIII.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengalokasian Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelola keuangan daerah			-		2 PMS	27,000,000	3 PMS	41,862,100	3 PMS	45,718,310	2 PMS	27,000,000				
				1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah PMS yang mengikuti Bimtek Keuangan					2 PMS	17,000,000	3 PMS	27,750,000.00	3 PMS	30,525,000.00	2 PMS	17,000,000	DFUPR	Lingk. DFUPR		
				2	Facilitasi Pemataan Aset pada SKPD	Tersedianya aset pada SKPD					1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	18,812,100.00	1 Laporan	18,198,310.00	1 Laporan	10,000,000				
				IX.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya SDM dan Kualitas Pelayanan Aparatur			-	100%	10,000,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000	100%	7,700,000	100%	7,000,000			
				1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	100%	10,000,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000.00	100%	7,700,000.00	100%	7,000,000			
				X.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah		100%	9,999,900		11,698,000		-		-		-					
				1	Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi		100%	9,999,900	100%	11,698,000							0%	-	DFUPR	Lingk. DFUPR	
				XI.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kecepatan, kemudahan dan aksesibilitas informasi		100%	671,416,500		781,998,150		-		-		-					
				1	Penyusunan Sistem Informasi Untuk Pelayanan Publik	Tersedianya dokumen Sistem Informasi untuk pelayanan publik			671,416,500	1 Dokumen	788,558,150								0%	-	DFUPR	Lingk. DFUPR
				2	Pemeliharaan Sistem Informasi Untuk Pelayanan Publik	Terpeliharanya dokumen Sistem Informasi untuk pelayanan publik			-	100%	53,435,000								0%	-		

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA



	3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	XII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	101,782,250	100%	87,609,500	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	10,000,000		
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	76,548,000	2 Laporan	7,500,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	11,000,000.00	2 Laporan	10,000,000	DPUPR	Lingk. DPUPR
			2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25,239,250	1 Dokumen	80,109,500						0%		-		
	4	Terwujudnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik	XIII.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-Persentase kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik/mantap (%), Persentase kondisi jalan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%), Panjang jalan kabupaten terbangun (km), Panjang jalan lingkungan terbangun (km)	82%, 82%, 46Km, 390Km	72,007,043,375	84%, 84%, 81Km, 465Km	31,292,619,266	59%, 56%, 56Km, 365Km	214,335,888,902	64%, 58 %, 23,89Km, 615Km	195,416,240,000	69%, 40%, 28,89Km, 690Km	214,957,864,000	59%, 56%, 56Km, 365Km	214,335,888,902		
			1	Pembangunan jalan	Panjang Jalan Kabupaten Yang di bangun dan diperbaiki				54.76 Km		136,911,538,310	57 Km	154,520,484,000	60 Km	169,972,477,400	54.76 Km	136,911,538,310	DPUPR	Kab. Kubu Raya
			2	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang di bangun dan diperbaiki	1,298.8 M	10,085,627,150	1063.7 M	4,603,596,500	623 M	4,834,869,600	805.18 M	3,424,750,000	885.70 M	3,833,225,000	623 M	4,834,869,600	DPUPR	Kab. Kubu Raya
			3	Pembangunan jalan Lingkungan	Panjang Jalan lingkungan Yang di bangun dan diperbaiki	115.73 Km	55,706,865,325	92.51 Km	25,423,011,500	985 Km	72,589,480,992	86 Km	87,411,056,000	94.18 Km	41,152,161,600	985 Km	72,589,480,992	DPUPR	Kab. Kubu Raya
			4	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan			2 Dokumen	436,971,666						0%		-		
			5	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	100%	6,214,550,900	100%	829,039,600						0%		-		
			XIV.	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Terpeliharanya kebersihan lingkungan	100%	1,296,931,600	100%	730,232,000	100%	818,476,800	100%	887,156,400	100%	975,872,040	100%	818,476,800		
			1	Pembersihan Bahu Jalan	panjang pembersihan bahu jalan	16.13 M	806,421,600	14.60 M	730,232,000	16 M	818,476,800	17.74 M	887,156,400	19.52 M	975,872,040	16 M	818,476,800		
			2	Pembersihan Partit	panjang pembersihan partit	30 M	490,510,000								0%		-		
	5	Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan jembatan	XV.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jembatan terbangun pada jalan kabupaten (meter), Panjang jembatan terbangun pada jalan lingkungan (meter), Jumlah jembatan yang diperbaiki dan dibangun (Unit)	80m, 612m, 12Unit	3,455,081,900	100m, 702m, 18Unit	1,917,760,085	125m, 812m, 14Unit	11,812,600,100	150m, 827m, 15Unit	1,260,674,950	170m, 880m, 16Unit	1,386,742,445	125m, 812m, 14Unit	11,812,600,100		
			1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Jalan yang diperbaiki/Rehab	33.89 m	2,065,933,950	46 m	919,895,100	125 m	11,351,920,500	150 m	1,260,674,950	170 m	1,386,742,445	125 m	11,351,920,500	DPUPR	Kab. Kubu Raya
			2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Panjang Jembatan yang diperbaiki/Rehab	234.9 M	1,280,226,050	87.2 M	872,607,100	46 M	460,679,600				-	46 M	460,679,600	DPUPR	Kab. Kubu Raya
			3	Facilitasi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	Tersedianya Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	100%	108,919,900	100%	125,257,885						0%		-		

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**



			XVI.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang diperbaiki/Rehab, Panjang Jembatan yang diperbaiki/Rehab			-	-	5Km, 13M	63,890,676,000	5Km, 23M	74,312,904,000	550m, 25M	81,744,194,400	5Km, 13M	63,890,676,000				
			1	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Panjang Jalan yang diperbaiki/Rehab					5 Km	50,101,875,800	5 Km	50,907,021,100	550 M	55,997,723,210	5 Km	50,101,875,800	DPUPR	Kab. Kubu Raya		
			2	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Panjang Jembatan yang diperbaiki/Rehab					13 M	13,788,800,200	23 M	23,405,882,900	25 M	25,746,471,190	13 M	13,788,800,200	DPUPR	Kab. Kubu Raya		
		7	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan	XVII.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan						100%	353,239,100	100%	388,563,010						
			1	Pemetaan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Tersedianya peta lingkungan pemukiman penduduk							100%	353,239,100	100%	388,563,010	0%					
		8	Meningkatnya jumlah wilayah yang dialiri air bersih	XVIII.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah wilayah kecamatan yang dialiri air bersih, Persentase Cakupan pelayanan air bersih pedesaan, Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	5% 5,79% 70% 48%	3,600,319,250	7% 5,97% 72,93% 51%	1,633,724,600	9% 6% 75,88% 51,03%	8,398,384,894	2% 6,15% 78,83% 57%	5,933,750,000	9% 6,3% 81,77% 60%	6,527,125,000	9% 6% 75,88% 51,03%	8,398,384,894			
			1	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah wilayah yang dialiri air bersih		5	2,930,454,200	7	1,633,724,600	9	8,398,384,894	2	5,933,750,000	2	6,527,125,000	9	8,398,384,894	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya Prasarana dan sarana air minum			100%	440,106,900							0%					
			3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Terpeliharanya sarana dan prasarana air minum			100%	229,778,150							0%					
				XIX.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		100%	2,521,180,600	100%	1,333,659,600	100%	4,566,988,900	100%	1,499,200,000	100%	1,649,120,000	100%	4,566,988,900		
			1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi			100%	2,521,180,600	100%	1,333,659,600	100%	4,566,988,900	100%	1,499,200,000	100%	1,649,120,000	100%	4,566,988,900	DPUPR	Kab. Kubu Raya
				XX.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		650 M	6,573,503,850	310 M	3,105,249,600	340 M	3,419,669,600	350 M	3,585,750,000	390 M	3,944,325,000	340 M	3,419,669,600		
			1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran drainase/gorong-gorong			650 M	6,573,503,850	310 M	3,105,249,600	340 M	3,419,669,600	350 M	3,585,750,000	390 M	3,944,325,000	340 M	3,419,669,600	DPUPR	Kab. Kubu Raya

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**



XXI.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Pengairan/Sumber Daya Air (%), Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%), Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok		50%, 40%, 60%	-	60%, 45%, 65%	-	70%, 50%, 70%	26,299,024,850	80%, 55%, 75%	39,707,041,800	85%, 60%, 78%	43,677,745,980	70%, 50%, 70%	26,299,024,850		
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Panjang normalisasi saluran sungai						88 M	8,832,420,300	180 M	17,186,425,500	190 M	18,905,068,050	88 M	8,832,420,300	DPUPR	Kab. Kubu Raya
2	Pembangunan jaringan rawa	Panjang pembangunan jaringan rawa						500 M	3,236,818,100					500 M	3,236,818,100	DPUPR	Kab. Kubu
3	Pembangunan Pintu Air	Pintu air yang terbangun (unit)								17 Unit	171,000,800	18 Unit	188,100,880	0%	-		
4	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan rawa	panjang jaringan rawa yang terpelihara						1000 M	13,539,324,550	1000 M	20,727,585,100	1500 M	22,800,343,610	1000 M	13,539,324,550	DPUPR	Kab. Kubu Raya
5	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen perencanaan/pengawasan infrasstruktur SDA						3 Dokumen	690,461,900	6 Dokumen	1,312,683,100	7 Dokumen	1,443,951,410	3 Dokumen	690,461,900	DPUPR	Kab. Kubu Raya
6	Database SDA yang berbasis aplikasi	Tersedianya Database SDA yang berbasis aplikasi								100%	309,347,300	100%	340,282,030	0%	-		
XXII.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya Pengelolaan air baku				-	-	1 Dokumen	351,965,000				-	1 Dokumen	351,965,000		
1	Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa						1 Dokumen	351,965,000				-	1 Dokumen	351,965,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya
XXIII.	Program Pengendalian Banjir	panjang bantaran dan tanggul sungai yang di rehab				-	-	10 M	2,404,156,850				-	10 M	2,404,156,850		
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang di rehab						10 M	1,203,420,800				-	10 M	1,203,420,800	DPUPR	Kab. Kubu Raya
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan						100 Laporan	393,755,050				-	100 Laporan	393,755,050	DPUPR	Kab. Kubu
3	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Pengendalian Banjir	Jumlah Dokumen Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Pengendalian Banjir						2 Dokumen	403,203,000				-	2 Dokumen	403,203,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya
4	Pembangunan prasarana pengendalian banjir	Panjang pembangunan Prasarana Pengendalian banjir						200 M	403,778,000				-	200 M	403,778,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**



12	Meningkatnya kesesuaian tata ruang sesuai peruntukannya	XXIV.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	100%	752,682,700	100%	411,464,500	100%	887,942,500	100%	719,405,500	100%	791,346,050	100%	887,942,500		
1	Perrusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan			Jumlah Dokumen RTRW	1 Dokumen	752,682,700	1 Dokumen	411,464,500	1 Dokumen	887,942,500	1 Dokumen	719,405,500	1 Dokumen	791,346,050	1 Dokumen	887,942,500	DFUPR	Kab. Kubu Raya
		XXV.	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya SOP tentang Penataan Ruang	100%	446,095,900	100%	645,355,100	100%	1,564,702,500	100%	533,293,000	100%	586,622,300	100%	1,564,702,500		
1	Survey dan pemetaan			Tersedianya data hasil survey dan pemetaan	100%	161,251,700	100%	170,340,000	100%	763,682,500	100%	64,492,500	100%	70,941,750	100%	763,682,500	DFUPR	Kab. Kubu Raya
2	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang			Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pemanfaatan ruang	5	25,151,700	8	89,830,000	10	275,380,000				1000%	275,380,000	DFUPR	Kab. Kubu Raya	
3	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang			Tersedianya peraturan standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang	1 Perbup	40,823,200	1 Perbup	117,125,100	1 Perbup	199,933,000	1 Perbup	93,800,500	1 Perbup	103,180,550	1 Perbup	199,933,000	DFUPR	Kab. Kubu Raya
4	Monitoring evaluasi dan pelaporan			Jumlah Laporan	1 Laporan	218,869,300	1 Laporan	268,060,000	1 Laporan	325,707,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	412,500,000	1 Laporan	325,707,000	DFUPR	Kab. Kubu Raya
13	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang)	XXVI.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang) (%)	72%	234,404,500	77%	334,397,000	82%	395,765,500	87%	336,941,500	92%	370,635,650	82%	395,765,500		
1	Pengawasan pemanfaatan ruang			Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang) (%)	100%	170,108,500	100%	237,297,000	100%	249,614,500	100%	336,941,500		370,635,650	100%	249,614,500	DFUPR	Kab. Kubu Raya
2	Perrusunan SKRK dan Dokumen Teknis IMB			Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%)	6257 Dok	10,804,600	11652 Dok	97,100,000	13,572 Dok	122,151,000				-	13,572 Dok	122,151,000	DFUPR	Kab. Kubu Raya
3	Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi			Terpeliharana sistem informasi					100%	24,000,000				-	100%	24,000,000	DFUPR	Kab. Kubu Raya
4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota			Tersedianya dana untuk koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	100%	53,491,400								0%	-			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA



			XXVII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rasio RTH (Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan)	6%	4,022,627,250	7%	1,672,811,600	8%	2,254,465,400	9%	1,904,878,600	10%	2,095,366,460	8%	2,254,465,400			
			1	Pemeliharaan RTH	Rasio RTH (Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan)					100%	2,254,465,400	100%	1,804,878,600	100%	1,985,366,460	100%	2,254,465,400			
			2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH							100%	100,000,000	100%	110,000,000	0%	-			
			3	Penyusunan Program Pengembangan RTH	Tersusunnya program pengembangan RTH			100%	153,968,500							0%	-			
			4	Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya taman				3,868,658,750	100%	1,672,811,600						0%	-		
	14	Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan	XXVIII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan, Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%), Persentase angkutan sampah, Persentase pengoperasian TPA	22%, 16%, 58%, 20%	22,161,254,750	29%, 17%, 61%, 32,5%	10,721,713,300	36%, 18%, 64%, 45%	13,860,203,496	43%, 19%, 67%, 57,5%	16,049,156,350	50%, 20%, 70%, 70%	17,654,071,985	36%, 18%, 64%, 45%	13,860,203,496			
	15	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sampah	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	10 DT	416,587,600	12 DT	426,129,975	12 DT	365,541,000	20 DT	729,135,000	25 DT	802,048,500	12 DT	365,541,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100%	21,744,667,150	100%	10,295,583,325	100%	13,158,772,496	100%	13,547,837,400	100%	14,902,621,140	100%	13,158,772,496	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			3	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Masyarakat mengetahui tentang kebijakan pengelolaan sampah					100%	235,352,000					100%	235,352,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah					100%	100,538,000	100%	83,513,000	100%	91,864,300	100%	100,538,000	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			5	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Tempat pengolahan Sampah							1 TPA	80,622,600	1 TPA	88,684,860	0%	-	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			6	Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan	Terkelolanya kemitraan dan retribusi kebersihan							100%	138,134,800	100%	151,948,280	0%	-	DPUPR	Kab. Kubu Raya	
			7	Pengelolaan Pemungutan Persampahan	Jumlah tempat pemungutan sampah							10 TPS	1,469,913,550	15 TPS	1,616,904,905	0%	-	DPUPR	Kab. Kubu Raya	



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**



	16	Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	XXIX.	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Persentase cakupan pelayanan listrik PJU	93,88%	3,380,330,050	95,39%	2,694,032,700	96,87%	17,195,329,500	98,32%	7,376,439,500	99,73%	8,114,083,450	96,87%	17,195,329,500		
			1	Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum	Jumlah desa yang dialiri listrik	93,88%	2,185,820,050	95,39%	2,089,635,800	96,87%	2,335,575,000	98,32%	150,575,000	99,73%	165,632,500	96,87%	2,335,575,000	DPUPR	Kab. Kubu
			2	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	Jumlah Titik PJU	70	1,194,510,000	221	604,396,900	500	14,859,754,500	300	7,225,864,500	350	7,948,450,950	500	14,859,754,500	DPUPR	Kab. Kubu



## BAB 7

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada table 7.1 berikut ini :



**Tabel 7.1.**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019			
							Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1.	Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa ( <i>Good Governance</i> )	T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1 Indeks Reformasi Birokrasi 2 Opini BPK 3 Nilai SAKIP	S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	3	Nilai SAKIP	C	CC	CC	CC	B	B	B
4	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	T.5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	9	Indeks Mobilitas	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	16	Indeks Mobilitas	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,85	0,85
				10			Indeks Konektivitas	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,80	
				11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.11	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	18	Ketaatan terhadap RTRW	60,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019		
							Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
				S.12	Meningkatnya layanan sanitasi	19	Persentase penduduk terlayani sanitasi	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	55,00%	60,00%	60,00 %
				S.13	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



## BAB 8 P E N U T U P

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya periode 2014 – 2019 yang secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dan acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya dalam menggerakkan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya periode 2014 – 2019 juga merupakan perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa RENSTRA mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, ini terkandung maksud agar lebih fleksibel dalam penjabarannya sehingga ada keluwesan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatannya sesuai skala prioritas pembangunan yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat diaplikasikan.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya a periode 2014 – 2019 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya periode 2014 – 2019 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra/RPJM dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra/RPJM setiap tahunnya, indikator program tersebut juga merupakan indikator di tingkat sasaran dimana program tersebut ditempatkan, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program- program yang termuat dalam Renstra Periode 2014 – 2019 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk RKPD.



Sungai Raya,

2018

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya

**ENCEP MULYADI, S. Sos**

Pembina

NIP. 19610819 198603 1 012